



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201973549, 1 Oktober 2019

Pencipta

Nama : **Dr. Rusmin Husain, M.Pd**

Alamat : Jl. Mohamad Yamin II, RT 001/RW 002 Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96115

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Rusmin Husain, M.Pd**

Alamat : Jl. Mohamad Yamin II, RT 001/RW 002 Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96115

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Sekolah Dasar**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Agustus 2017, di Gorontalo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000156515

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 UNTUK SEKOLAH DASAR

RUSMIN HUSAIN



IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 UNTUK SEKOLAH DASAR

© 2017, Rusmin Husain
vi + hlm; 14,5 x 21 cm
ISBN:

Design Sampul
Zahir Publishing

Tata Letak
Zahir Publishing

Diterbitkan oleh:



Kadisoka RT.05 RW.02, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
0857 2589 4940 E: zahirpublishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
BAB I Hakikat Kurikulum.....	1
BAB II Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar	6
BAB III Hakikat Tenaga Pendidik	22
BAB IV Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Tenaga Pendidik Tentang Kurikulum.....	34
A. Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik	34
B. Kompetensi Tenaga Pendidik.....	36
C. Karakteristik Tenaga Pendidik	39
D. Sosialisasi Kurikulum	40
BAB V Kerangka Pikir	42
BAB VI Hasil Penelitian Pada Aras Lokal	46
BAB VII Studi Kasus Lokal.....	56
BAB VIII Pemahaman Tenaga Pendidik tentang Kurikulum 2013	67
BAB IX Harapan Besar Implementasi Kurikulum 2013	71
A. Kompetensi Utama	72
B. Maksimalkan Peran.....	73
BAB X Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo	83
A. Faktor Pendukung.....	83
B. Faktor Penghambat.....	85

BAB XI Penutup	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88
C. Rekomendasi.....	89
Daftar Pustaka.....	91
Curriculum Vitae	95

BAB I

HAKIKAT KURIKULUM

Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah; sedangkan dalam pengertian luas kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa, selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah itu. Dengan pengertian luas ini berarti, segala usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam usaha menghasilkan lulusan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tercakup dalam pengertian kurikulum (Soetjipto dan Kosasi, 2009:148).

Menurut Mulyadi (dalam Chamisijatin dkk., 2008:1-6), bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengertian. Pertama, kurikulum sebagai produk merupakan hasil perencanaan, pengembangan, dan perwujudan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum dalam arti produk merupakan hasil kongkrit yang dapat diamati dalam bentuk dokumen hasil kerja sebuah tim pengembangan kurikulum. Kedua, kurikulum sebagai program merupakan kurikulum yang berbentuk program-program pengajaran yang riil. Dalam bentuk yang ekstrim, kurikulum sebagai program dapat termanifestasikan dalam serentetan daftar pelajaran ataupun pokok bahasan yang diajarkan pada kurun waktu tertentu, seperti dalam kurun

waktu satu semester. Ketiga, kurikulum sebagai hasil belajar yang ingin dicapai oleh para siswa, mendeskripsikan kurikulum sebagai pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, dan berbagai bentuk pemahaman terhadap bidang studi. Walau pengertian ini lebih konseptual, namun hasil belajar yang diinginkan siswa juga sering dituangkan dalam dokumen seperti halnya tujuan belajar, seperangkat konsep yang harus dikuasai, prinsip-prinsip belajar, dan sebagainya. Keempat, kurikulum sebagai pengalaman belajar, yang merupakan akumulasi pengalaman pendidikan yang diperoleh siswa sebagai hasil kegiatan belajar atau pengaruh situasi dan kondisi belajar yang telah direncanakan. Konsekuensinya apa yang direncanakan dalam kurikulum belum tentu berhasil sebagaimana yang diharapkan karena begitu banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kemampuan guru dalam menerapkan dan mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran. Artinya, sebaik apapun sebuah kurikulum bila tidak didukung oleh guru yang profesional tentu tidak banyak memberikan makna terhadap siswa; demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, kita mendapatkan pemahaman bahwa kurikulum mempunyai fungsi dan peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan; bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran; bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan; bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah; bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah; dan bagi siswa selaku subjek didik, kurikulum berfungsi

sebagai suatu pedoman belajar yang memiliki fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, serta fungsi diagnostik (Tim Pengembang MKDP, 2011:9; Muzamiroh, 2013:20).

Sementara terkait dengan peranan kurikulum dalam pendidikan khususnya pendidikan formal, terdapat tiga peranan utama. Pertama, peranan konservatif, yang menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sarana mentransformasikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Kedua, peranan kreatif, yang menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masa sekarang serta masa yang akan datang. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif, yang menekankan bahwa kurikulum tidak saja sekedar mewariskan nilai budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut, dalam hal ini kurikulum berperan sebagai kontrol atau sarana filterisasi sosial (Hamalik dalam Tim Pengembang MKDP, 2011:10; Muzamiroh, 2013:24).

Selanjutnya, kurikulum pada dasarnya terdiri dari sejumlah komponen. Secara sederhana, kebanyakan kurikulum mencakup tujuan, mata pelajaran, pengalaman pembelajaran, dan pendekatan penilaian; sementara beberapa kurikulum lainnya juga mencakup penilaian kebutuhan, rasional, sasaran/target, sarana/prasarana, bahan-bahan, serta diskusi tentang teori belajar dan teori pembelajaran (Yulaelawati, 2004:35). Menurut Sukmadinata (2008:102-113), suatu kurikulum terdiri dari sejumlah komponen. Pertama tujuan, yang mengarahkan semua kegiatan pengajaran

dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya; tujuan ini dirumuskan atas dua hal, yakni perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat di satu sisi serta pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama falsafah negara di sisi lain. Kedua bahan ajar, yang terdiri dari topik dan sub topik, yang mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga strategi atau metode mengajar, yang disesuaikan dengan bahan ajar. Keempat media mengajar, yang merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Kelima evaluasi pengajaran, yang ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Keenam penyempurnaan pengajaran, yang merupakan umpan balik atas hasil evaluasi pengajaran, yang dilakukan demi penyempurnaan komponen-komponen dalam kurikulum.

Dalam pandangan yang tidak jauh berbeda, Hamid (2012:41-44), mengemukakan bahwa terdapat empat komponen kurikulum. Pertama komponen tujuan, yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Pada tingkat makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Tujuan kurikulum dapat diklasifikasikan dari tujuan yang paling umum hingga tujuan khusus yang dapat diukur yang dinamakan kompetensi. Kedua komponen isi atau materi pelajaran, yang merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Ketiga komponen metode atau strategi, meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat komponen evaluasi untuk melihat efektivitas atau keberhasilan pencapaian tujuan.

Berdasarkan keseluruhan tinjauan mengenai hakikat kurikulum di atas dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, maka kurikulum dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat dokumen tertulis hasil kesepakatan tim penyusun, pemegang kebijakan, dan masyarakat, yang berfungsi sebagai acuan bagi tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di sekolah, yang guna keberhasilan implementasinya maka tenaga pendidik selaku implementor harus memahami dengan baik komponen-komponen penyusun kurikulum tersebut. Dari definisi ini, maka nampak jelas bahwa tingkat pemahaman tenaga pendidik terhadap kurikulum 2013 yang menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini, dapat dianalisis dari pemahaman tenaga pendidik terhadap sejumlah komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013.

BAB II

KURIKULUM 2013 TINGKAT SEKOLAH DASAR

Sebagai konsekuensi logis dari batasan lingkup penelitian pada tingkat SDN, maka pada bagian ini dikemukakan tinjauan kurikulum 2013 yang hanya memiliki relevansi dengan tingkatan SD. Selain itu, dalam keterkaitannya dengan tingkat pemahaman tenaga pendidik SDN yang merupakan salah satu permasalahan penelitian, maka sebagaimana yang dikemukakan pada bagian hakikat kurikulum, fokus tinjauan ini ditekankan pada komponen-komponen kurikulum 2013 yang harus dipahami tenaga pendidik guna keberhasilan implementasinya, dalam hubungannya dengan sejumlah regulasi yang relevan.

Dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, didapatkan bahwa kurikulum 2013 pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 pada dasarnya dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta

didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Secara spesifik, filosofi yang digunakan dalam kurikulum 2013 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan

potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan

untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Selanjutnya, kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan sejumlah faktor. Pertama, tantangan internal dalam pendidikan nasional, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Kedua, tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization* (WTO), *Association*

of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* dan *Program for International Student Assessment (PISA)* sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Ketiga, penyempurnaan pola pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; (2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya); (3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); (5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); (6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan

(*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; (8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan (9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar matapelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola: (1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif; (2) penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan (3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Kelima, penguatan materi yang dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

Lebih jauh, dalam regulasi tersebut didapatkan bahwa kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;
6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Pada dasarnya, Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas pendekatan teoritis yang menjadi dasar kurikulum 2013, yakni “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap,

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

Bila ditinjau dari standar nasional pendidikan, substansi perubahan yang terdapat dalam kurikulum 2013 hanya terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian. Masing-masing standar tersebut merupakan bagian dari 8 standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang penjabarannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Masing-masing elemen perubahan dalam standar nasional pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai elemen perubahan pertama, dapat diartikan sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP No. 32 Tahun 2013). Pertama, dimensi sikap dengan kualifikasi kemampuan siswa yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kedua, dimensi pengetahuan

dengan kualifikasi kemampuan siswa yang memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Ketiga, dimensi keterampilan dengan kualifikasi kemampuan siswa yang memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya (Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013).

Elemen perubahan kedua yakni standar isi, yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang (PP No. 32 Tahun 2013).

Dalam regulasi lanjutan, yakni Permendikbud No. 64 Tahun 2013, dikemukakan bahwa standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan,

dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Khusus untuk jenjang pendidikan SD, kompetensi yang dicapai berada pada tiga tingkatan, yakni tingkat I untuk kelas 1 dan 2, tingkat II untuk kelas 3 dan 4, serta tingkat III untuk kelas 5 dan 6. Sehubungan dengan hal ini, perlu ditekankan bahwa untuk tahun ajaran 2013/2014 jenjang pendidikan SD, kurikulum 2013 baru diimplementasikan pada kelas 1 dan 4, sehingga hanya tingkat kompetensi I dan II yang dikemukakan pada bagian ini berdasarkan pertimbangan relevansi dengan penelitian.

Dalam regulasi tersebut dikemukakan bahwa tingkat kompetensi I (kelas 1 dan 2) mencakup dimensi: pertama sikap spiritual, yang dideskripsikan sebagai sikap menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta sikap sosial, yang dideskripsikan sebagai sikap menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; kedua dimensi pengetahuan, yang dideskripsikan sebagai kompetensi dalam memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah; ketiga dimensi keterampilan, yang dideskripsikan

sebagai kompetensi dalam menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sementara tingkat kompetensi II mencakup: pertama sikap spiritual, yang dideskripsikan sebagai sikap menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta sikap sosial, yang dideskripsikan sebagai sikap menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan **tetangganya**; kedua dimensi pengetahuan, yang dideskripsikan sebagai kompetensi dalam memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan **tempat bermain**; ketiga dimensi keterampilan, yang dideskripsikan sebagai kompetensi dalam menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, **sistematis**, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Bila kita hanya menelaah tingkat kompetensi beserta deskripsinya, maka kemungkinan besar kita berpendapat bahwa antara tingkatan kompetensi I dan II pada SD hanya terdapat perbedaan yang sederhana, sebagaimana yang nampak dalam sejumlah poin yang ditebalkan di atas. Namun, tidak demikian halnya jika memperluas tinjauan pada keterkaitan antara masing-masing tingkat kompetensi dengan ruang lingkup materinya, yang dalam hal ini ditekankan bahwa untuk tingkat kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat kompetensi,

semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian, yang mana hal ini dapat ditelusuri pada sejumlah ruang lingkup materi untuk masing-masing tingkat kompetensi. Selain itu, hal ini juga berdasarkan ketentuan bahwa dari tingkat kompetensi tersebut ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Secara hirarkis, kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi. Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap muatan kurikulum. Selanjutnya, Kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum satuan dan jenjang pendidikan.

Elemen perubahan ketiga yakni standar proses sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, dapat diartikan sebagai kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan yang mengacu pada SKL dan standar isi, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Terhadap hal-hal yang menjadi cakupan standar proses, hanya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil, yang secara langsung dilakukan oleh tenaga pendidik pada tingkat SD. Pertama terkait dengan perencanaan pembelajaran, tenaga pendidik tidak lagi dibebankan untuk menyusun silabus dan bahan ajar, tinggal menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan, berdasarkan ketentuan dalam kurikulum 2013. Kedua

pelaksanaan pembelajaran, yang terkait dengan: (1) kegiatan pendahuluan, yakni aktivitas yang dilakukan guru terkait persiapan pembelajaran, mulai dari persiapan psikis dan fisik siswa, memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus; (2) kegiatan inti, yang merupakan aktivitas penggunaan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran; dan (3) kegiatan penutup, yakni aktivitas refleksi yang dilakukan guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok, baik untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh guna secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas baik tugas individual maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ketiga penilaian hasil dan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*), yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan

untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Elemen perubahan terakhir yakni standar penilaian sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK), yang merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

Khusus untuk kompetensi sikap, pendidik melakukan penilaian melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen

yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik: (1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati; (2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. (3) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik; (4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

Khusus untuk kompetensi pengetahuan, pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan: (1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran; (2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan; (3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Sementara untuk kompetensi keterampilan, pendidik menilai melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio.

Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik: (1) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi; (2) Proyek adalah tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu; (3) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.

Berdasarkan keseluruhan tinjauan mengenai kurikulum 2013 di atas, dapat ditarik suatu garis pemahaman, bahwa kurikulum 2013 dikembangkan dari nilai-nilai dan budaya bangsa sebagaimana yang dituangkan dalam falsafah NKRI, sekaligus mengakomodir sejumlah tantangan, tuntutan, serta kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penyesuaian terhadap standar nasional pendidikan, terutama atas standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

BAB III

HAKIKAT TENAGA PENDIDIK

Pada bagian ini akan dikemukakan tinjauan mengenai hakikat tenaga pendidik, mulai dari definisi hingga keterkaitan perannya dengan kurikulum dalam pendidikan. Selain itu perlu ditekankan kembali sebagaimana pada bagian ruang lingkup, bahwa konsekuensi batasan penelitian pada tingkat SD mengakibatkan tenaga pendidik hanya didefinisikan sebagai guru, sehingga bila ditemukan term “tenaga pendidik” pada tinjauan ini, maka yang dirujuk oleh term tersebut adalah “guru”.

Dalam falsafah pendidikan yang dibangun Ki Hadjar Dewantara, jabatan, kedudukan, atau status tenaga pendidik yang melekat pada diri seseorang bukanlah perkara yang sederhana. Seorang tenaga pendidik dalam falsafah ini tidak saja harus menguasai pengetahuan yang dinamakan “ilmu pendidikan”; tidak saja harus menguasai ilmu yang berkaitan dengan syarat-syarat pendidikan yakni psikologi, fisiologi, etika atau moral, estetika, dan ikhtisar cara-cara pendidikan; tetapi juga kepribadian yang dilandasi tanggung jawab yang tinggi selaku pendidik yang mampu memberikan teladan, tuntutan, dan dorongan (Dewantara, 1962); yang kesemuanya itu menempatkan tenaga pendidik pada posisi yang mulia dalam kehidupan. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan apa yang dikemukakan (Saudagar dan Idrus, 2009:98-

99), bahwa jabatan tenaga pendidik bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi tenaga pendidik dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai tenaga pendidik, tetapi juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan. Kemampuan-kemampuan itu membuat tenaga pendidik memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya. Sesuai dengan nilai sosial budaya kita, secara historis kedudukan tenaga pendidik itu tinggi dalam masyarakat kita. Tenaga pendidik adalah seorang yang patut dipatuhi, ditiru (diteladani) kata dan perbuatannya. Motif utama menjadi tenaga pendidik bukan imbalan gaji (kebendaan), tetapi adalah panggilan (*calling*) untuk mengabdikan kepada Tuhan, masyarakat, dan kemanusiaan.

Dalam perkembangan pemahaman mengenai tenaga pendidik, seringkali kita mempertukarkan antara term “tenaga pendidik” dengan term “guru”. Pada dasarnya pemahaman yang demikian tidaklah keliru. Secara definisi kata “guru” bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Akan tetapi, sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang bisa berbeda maknanya. Kata pendidik (bahasa Indonesia) merupakan padanan dari kata *educator* (bahasa Inggris). Di dalam kamus *Webster* kata *educator* berarti *educationist* atau *educationalist* yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah pendidik, spesialis di bidang pendidikan, atau

ahli pendidikan. Kata guru (bahasa Indonesia) merupakan padanan dari kata *teacher* (bahasa Inggris). Di dalam kamus *Webster*, kata *teacher* bermakna sebagai “*the person who teach, especially in school*” atau guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di sekolah (Danim dan Khairil, 2010:5).

Dalam pengertian yang lain, guru dikenal dengan *al-mu’alim* atau *al-ustadz* dalam bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi; tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih). Namun, pada dinamika selanjutnya definisi guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah (Suprihatiningrum, 2013:23).

Sebagai seorang profesional, pendidik memiliki ciri-ciri seperti yang dikembangkan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (dalam Syaifuddin, 2007:5-4): (1) memiliki fungsi dan signifikansi sosial; (2) memiliki keahlian dan ketrampilan tingkat tertentu; (3) memperoleh keahlian dan ketrampilan melalui metode ilmiah; (4) memiliki disiplin ilmu; (5) memiliki latar pendidikan perguruan tinggi; (6) memiliki etika profesi yang dikontrol organisasi profesi; (7) bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya; (8) mempunyai nilai sosial di masyarakat; (9) berhak mendapatkan imbalan yang layak.

Tuntutan profesionalisme di atas kemudian dituangkan secara spesifik dalam prinsip profesi guru, yakni bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005).

Selanjutnya, telaah mengenai sejumlah regulasi di Indonesia juga memberikan pemahaman mengenai perkembangan definisi mengenai tenaga pendidik dan guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga Pendidik dipahami sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan

regulasi tersebut, nampak bahwa guru hanyalah salah satu jenis kualifikasi dari tenaga pendidik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, didapatkan pemahaman bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam regulasi ini juga dipahami bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang ditujukan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak keliru pemahaman yang menyamakan antara tenaga pendidik dengan guru, dikarenakan kedudukan guru sebagai pendidik profesional.

Dalam regulasi lainnya, yakni PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, didapatkan pemahaman bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Regulasi

ini kian memperjelas bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara term tenaga pendidik dengan term guru, khususnya dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

Berdasarkan hal di atas, maka term guru tetap dapat dipertukarkan dengan tenaga pendidik dalam konteks tertentu terutama dalam tingkatan sekolah dasar yang menjadi lokus penelitian ini, sehingga tidak menjadi permasalahan berarti bila selanjutnya hanya term “guru” yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini juga ditujukan agar dimensi guru yang khamaompleks, tidak terdistorsi dengan penyempitan makna yang dialami oleh term “pendidik”, sebagaimana yang nampak dalam sejumlah regulasi di atas, bahwa “mendidik” hanya merupakan salah satu tugas profesional guru, selain mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Dengan demikian, penggunaan term guru untuk selanjutnya diharapkan dapat menjaga pemahaman mengenai term guru secara komprehensif, sekaligus menjadikan uraian lebih spesifik.

Tidak sampai di situ saja, perkembangan mengenai definisi tenaga pendidik dan guru di atas juga menyebabkan perkembangan dalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada profesinya. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 dikemukakan bahwa pendidik berhak memperoleh: (1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sementara pendidik berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan

yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Hak dan kewajiban tenaga pendidik dalam regulasi di atas mengalami perkembangan ke arah kompleksitas, ketika guru pada gilirannya dipahami sebagai pendidik profesional. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dikemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Sementara dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Adanya perkembangan pemahaman mengenai definisi, kedudukan, hak, dan kewajiban guru di atas pada dasarnya dikarenakan kompleksitas dimensi hakikat jabatan guru itu sendiri. Djumiran dkk. (2009:1-18), mengemukakan bahwa jabatan guru pada dasarnya melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti batang tubuh ilmu khusus, memerlukan pendidikan/pelatihan yang lama, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjadikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan standarnya sendiri, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, serta memberikan layanan dibidang pembelajaran, bimbingan, administrasi, kesehatan sekolah, dan ekstra kurikuler. Kompleksitas yang terdapat dalam jabatan guru sebagaimana yang tergambar di atas, kian mempertegas pemahaman bahwa untuk menjadi guru tidaklah semudah yang dibayangkan, karena untuk menjadi guru, seseorang harus mampu mengemban tanggung jawab yang tinggi dalam membentuk kualitas pendidikan generasi muda penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

Hal di atas memberikan kita pemahaman bahwa guru pada hakikatnya merupakan kunci dalam peningkatan mutu

pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu peningkatan pendidikan seperti perubahan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, dan penyediaan sarana-prasarana akan berarti apabila melibatkan guru (Saudagar dan Idrus, 2009:85). Berdasarkan hal ini, maka guru diposisikan sebagai garda terdepan dan sentral dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan kinerja dan totalitas dedikasi serta loyalitas pengabdianya. Sorotan tersebut lebih bermuara kepada ketidakmampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga bermuara pada menurunnya mutu pendidikan. Walaupun sorotan itu lebih mengarah pada sisi-sisi kelemahan guru, dan mungkin ada sistem yang berlaku, baik sengaja ataupun tidak akan berpengaruh terhadap permasalahan tadi. Banyak hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan, bagaimana kinerja guru akan berdampak kepada pendidikan bermutu. Melihat sisi lemah dari sistem pendidikan nasional, dengan gonta-ganti kurikulum pendidikan, maka secara langsung atau tidak akan berdampak kepada guru itu sendiri, sehingga perubahan kurikulum dapat menjadi beban psikologis bagi guru, dan mungkin juga akan dapat membuat guru frustrasi akibat perubahan tersebut. Hal ini sangat dirasakan oleh guru yang memiliki kemampuan minimal, dan tidak demikian halnya guru profesional (Fathurrohman dan Suryana, 2012:29-30).

Sebagai salah satu bidang yang menuntut profesionalisme yang tinggi, peran guru bersifat multidimensional, yang mana guru menduduki peran sebagai: (1) orang tua; (2) pendidik atau pengajar; (3) pemimpin atau manajer; (4) produsen atau pelayan;

(5) pembimbing atau fasilitator; (6) motivator atau stimulator; (7) peneliti atau narasumber. Peran tersebut dapat bergradasi menurun, atau tetap sesuai dengan jenjang tuntutananya (Tampubolon dalam Suprihatiningrum, 2013:27). Hal ini pada dasarnya sejalan dengan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang peran guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah yakni sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Berdasarkan sejumlah telaah di atas, nampak jelas signifikansi guru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, dalam menjalankan perannya sebagai agen pembelajaran, guru tetap harus dituntun oleh suatu pedoman guna mengarahkan kesatuan pembelajaran demi pencapaian tujuan pendidikan nasional, dalam hal ini diperlukan suatu kurikulum. Keterkaitan antara guru dengan kurikulum merupakan keterkaitan mutual; di satu sisi kurikulum berguna sebagai pedoman guru dalam penyelenggaraan aktivitas belajar-mengajar; dan di sisi lain, agar kurikulum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang memberikan kesatuan arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka peran guru selaku implementor menjadi signifikan.

Dalam konteks kontemporer, peran guru selaku implementor kian krusial, mengingat sering terjadinya perubahan kurikulum pendidikan nasional; bahkan belum sempurna suatu kurikulum terimplementasi secara luas dan komprehensif, justru telah digantikan oleh kurikulum yang baru, seperti yang terjadi saat ini yakni kurikulum 2013 telah menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diakui mayoritas belum sempat terimplementasi secara luas dan komprehensif. Kondisi ini tentu membutuhkan kesiapan guru yang mampu memahami dengan baik mengenai urgensi suatu kurikulum, termasuk

muatan-muatan yang tertuang dalam kurikulum baru tersebut. Hal ini signifikan, mengingat bila guru tidak mampu memahami dengan baik urgensi perubahan kurikulum sekaligus muatan-muatannya, maka perubahan kurikulum hanya menjadi hal yang sia-sia, sehingga kurikulum baru tersebut tidak terimplementasi dengan baik, yang pada gilirannya menghambat kesatuan arah penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Hageaves dan Sarason (dalam Suprihatiningrum, 2012:18), bahwa perubahan kurikulum akan berhasil apabila guru mau berubah. Hal ini mengindikasikan bahwa berhasilnya perubahan kurikulum tergantung pada kemauan dan kemampuan guru dalam menangkap perubahan yang terjadi dan kemudian melaksanakannya.

Di dalam pelaksanaan kurikulum tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok (dapat dengan sesama guru di satu sekolah, dengan guru di sekolah lain atau dengan kepala sekolah dan personel pendidikan lain seperti pengawas). Tentunya agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik, maka guru yang bersangkutan harus memahami dengan baik kurikulum tersebut. Pada titik ini, pemahaman tentang administrasi pengembangan kurikulum akan sangat membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum menjadi pengalaman belajar siswa (Soetjipto dan Kosasi, 2009:146-149). Namun ironisnya, di tengah berbagai perubahan kurikulum yang telah dilalui, kualitas pendidikan nasional tetap menjadi pertanyaan yang mendasar. Hal ini secara implisit menegaskan bahwa permasalahan mendasar pendidikan nasional kita bukanlah terletak pada kurikulum, melainkan terletak pada guru selaku aktor yang mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Guru, di tengah kondisi perubahan kurikulum justru berhadapan dengan sejumlah permasalahan kronis, diantaranya beragamnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan; guru tidak layak mengajar; belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru; pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan; guru belum profesional; kesejahteraan guru yang belum memadai; dan masih terbatasnya lembaga penjamin mutu guru (Fathurrohman dan Suryana, 2012; Suprihatiningrum, 2012). Mencermati hal tersebut, maka dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah seharusnya tidak saja memfokuskan perhatiannya pada perubahan kurikulum guna menjawab sejumlah tantangan yang ada, tetapi juga perlu memfokuskan perhatiannya dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi guru, sehingga reformasi pendidikan yang dicita-citakan dapat dicapai secara simultan; tidak secara parsial.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik suatu garis pemahaman bahwa pada hakikatnya guru selaku tenaga pendidik memiliki peran signifikan dan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Khusus keterkaitannya dengan kurikulum, maka dibutuhkan guru yang mampu memahami dengan baik urgensi, signifikansi, dan substansi dari suatu kurikulum, sehingga guru dapat menerjemahkan dengan baik kurikulum tersebut dalam proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya mengarahkan pengalaman belajar siswa dalam kesatuan arah pencapaian tujuan pendidikan nasional.

BAB IV

TINJAUAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PEMAHAMAN TENAGA PENDIDIK TENTANG KURIKULUM

Pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum. Dalam penelitian ini, pada dasarnya sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh akan ditelusuri dan berkembang dalam proses penelitian. Namun, dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai sejumlah faktor berpengaruh yang kemungkinan ditemukan di lapangan penelitian, maka dipandang perlu untuk mengkaji hal tersebut terlebih dahulu. Adapun sejumlah faktor berpengaruh tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik

Kualifikasi akademik pada dasarnya dipahami sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan, yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2008). Khusus untuk tingkat guru SD yang

menjadi objek penelitian, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi perguruan tinggi yang terakreditasi (UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; Permendiknas No. 16 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2008).

Kualifikasi akademik dalam bentuk ijazah, pada dasarnya merefleksikan kemampuan yang dimiliki guru bersangkutan sesuai dengan bidang kepakaran yang ditunjukkan dalam ijazah tersebut. Dengan dimilikinya ijazah yang sesuai dengan bidang ilmu yang disyaratkan bagi guru SD, maka diasumsikan bahwa guru yang bersangkutan mampu memahami dengan dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar, yang termasuk di dalamnya pemahaman tentang kurikulum SD. Disadari, kondisi demikian tidak selamanya ditemukan dalam realitas; bisa jadi ada guru dengan strata S3 justru memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap kurikulum; begitupun sebaliknya, guru dengan tingkat strata S1 justru mampu memahami kurikulum dengan baik. Hal ini secara mendasar wajar dalam pendidikan, terlebih sejak awal kita telah memahami bahwa pendidikan dalam diri manusia inheren dan sifatnya sepanjang hayat (*long life learning*); atau dengan kata lain, pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal apakah terkait pemahamannya tentang kurikulum atau hal lainnya, secara substansial lebih ditentukan oleh proses pembelajaran yang dilaluinya selama hidup ketimbang melalui bukti fisik ijazah yang bersangkutan.

Penelitian Hartini (2005) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman guru SMK Putra Tama Bantul Yogyakarta terhadap kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat

menjadi contoh hal ini. Dari penelusuran data penelitian dengan kuisioner, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan *chi square*, didapatkan bahwa tidak ada pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap pemahaman guru tentang KBK (X^2 hitung $< X^2$ Tabel), yang secara kualitatif dapat dipahami bahwa pemahaman guru tentang KBK tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan guru yang bersangkutan, apapun tingkat stratanya.

Keseluruhan hal di atas memberikan kita pemahaman bahwa kualifikasi akademik bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tingkat pemahaman guru terhadap kurikulum (namun kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah tersebut tetap memiliki relevansi, karena tetap dijadikan standar dalam profesi atau pekerjaan apapun termasuk guru). Masih ada sejumlah faktor lainnya, seperti kompetensi yang dimiliki guru, sebagaimana yang dapat diuraikan sebagai berikut.

B. Kompetensi Tenaga Pendidik

Dalam penelusuran sejumlah sumber didapatkan bahwa untuk menjadi guru yang kompeten/berkualitas, guru yang bersangkutan harus memiliki kompetensi inti yang disyaratkan, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Saudagar dan Idrus, 2009; Sagala, 2011; Saondi dan Suherman, 2012; Suprihatiningrum 2013). Kompetensi yang dimiliki guru ini pada gilirannya menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, salah satunya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Dengan kompetensi yang mumpuni, diasumsikan bahwa guru yang bersangkutan mampu memahami dengan baik kurikulum yang menjadi pedoman aktivitas belajar-mengajar di sekolahnya.

Dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005, kompetensi pada dasarnya dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; dan Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dalam PP No. 74 Tahun 2008, ditekankan bahwa kompetensi guru bersifat holistik, yang berarti kompetensi yang terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru. Secara rinci kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: beriman dan bertakwa; berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; secara

obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Berdasarkan telaah di atas, kita memahami bahwa kompetensi baik pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional signifikan bagi setiap guru dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari hal di atas pula, dapat dilihat bahwa bila guru memiliki kompetensi yang disyaratkan tersebut, maka pemahaman terhadap kurikulum bukanlah hal yang perlu dipertanyakan, mengingat substansi yang dimiliki setiap kurikulum pasti relevan dengan kompetensi yang disyaratkan kepada setiap guru selaku implementor. Namun, hal ini masih sebatas asumsi dasar yang masih perlu diuji secara

ilmiah, dan inilah salah satunya yang ingin diungkap dalam penelitian ini.

Lebih jauh, permasalahan mendasar dalam keterkaitannya dengan kompetensi guru di sini adalah tidak adanya alat ukur yang akurat untuk menentukan apakah guru yang bersangkutan telah memiliki kompetensi yang diharapkan, sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian tinjauan mengenai hakikat tenaga pendidik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kompetensi guru hanya ditelusuri melalui “sertifikasi guru”. Hal ini atas asumsi dasar bahwa untuk mendapatkan status “tersertifikasi”, maka guru yang bersangkutan harus lolos uji kompetensi yang disyaratkan dalam proses sertifikasi guru tersebut; sehingga, status “tersertifikasi” atau “belum tersertifikasi” dapat digunakan sebagai instrument untuk mengetahui apakah guru yang bersangkutan memiliki kompetensi yang disyaratkan. Selain itu, sertifikasi guru juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kompetensi guru dikarenakan hal ini juga dijadikan standar pemerintah nasional dalam menguji apakah guru yang bersangkutan kompeten atau tidak, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

C. Karakteristik Tenaga Pendidik

Karakteristik secara sederhana dapat dimaknai sebagai ciri khas, sifat, atau watak yang melekat pada sesuatu. Dalam keterkaitannya dengan guru, karakteristik yang dimaksud seperti usia, jenis kelamin, pengalaman (lama mengajar), status guru apakah PNS, honorer, guru bantu/kontrak, dan sebagainya. Keterkaitannya dengan tingkat pemahaman terhadap kurikulum, karakteristik guru juga dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Dalam hal usia, guru pada tingkat usia lanjut misalnya

cenderung untuk tidak mengindahkan kurikulum dikarenakan sejumlah faktor, apakah telah terbiasa dengan kurikulum lama, kemampuan adaptasi menurun, terlanjur merasa nyaman dengan kondisi yang ada sehingga cenderung mempertahankan *status quo*, dan sebagainya yang turut menghambat implementasi kurikulum baru; di sisi lain, guru pada tingkat usia muda cenderung mudah memahami suatu kurikulum dikarenakan masih memiliki waktu yang lama dalam beradaptasi, masih suka dengan tantangan, masih memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri, dan sebagainya, yang turut mendukung implementasi kurikulum; guru dengan jenis kelamin laki-laki secara psikologis cenderung rasional dalam memahami kurikulum; pengalaman mengajar juga sangat membantu seseorang dalam memahami kurikulum, terutama apabila yang bersangkutan telah terbiasa dengan pergantian kurikulum; bahkan status guru turut menentukan tingkat pemahaman, seperti guru kontrak yang cenderung tidak mengindahkan kurikulum dikarenakan perhatiannya lebih banyak tersita untuk memikirkan nasibnya yang belum menjadi PNS, ketimbang memikirkan kurikulum yang menurutnya tidak relevan dengan statusnya.

D. Sosialisasi Kurikulum

Sosialisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya; ataukah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; atau pemasyarakatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Dari pemaknaan di atas, maka jelaslah bahwa sosialisasi apakah terkait kebijakan/program khususnya kurikulum pendidikan sangat penting, agar apa yang

disosialisasikan tersebut dikenal, dipahami, dan dihayati, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh implementor.

Dalam realitas, banyak ditemukan kasus bahwa guru kurang memahami kurikulum hanya karena permasalahan sosialisasi yang kurang, terutama guru-guru yang berada di pelosok. Bahkan, guru-guru yang mendapatkan sosialisasi apakah melalui diklat, workshop, seminar, forum diskusi ilmiah, media cetak, media elektronik, internet dan sebagainya belum tentu memahami dengan baik suatu kurikulum, apalagi bagi yang tidak mendapatkan sosialisasi. Sekalipun demikian, sosialisasi kurikulum pendidikan tetap signifikan guna memasyarakatkan kurikulum, sehingga kurikulum mudah dipahami dan dihayati, sehingga dapat diimplementasikan secara berhasil.

BAB V

KERANGKA PIKIR

Dari serangkaian uraian dalam penelitian ini, perlu kiranya diberikan suatu gambaran alur penelitian dengan model “kerangka pikir” guna memudahkan baik peneliti maupun pembaca memahami arah penelitian ini. Kerangka ini didesain untuk mengetahui kondisi riil penerapan kurikulum 2013 di SDN Provinsi Gorontalo; mengetahui, mengukur, dan menganalisis tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo tentang kurikulum 2013; serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2013.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa kurikulum 2013 belum genap setahun diimplementasikan, sehingga yang dapat ditelaah dari dimensi implementasinya hanyalah deskripsi mengenai kondisi riil penerapannya saat ini di SDN Provinsi Gorontalo. Sementara terkait dengan variabel tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo, dari tinjauan mengenai kurikulum 2013 tingkat SD didapatkan sejumlah hal harus dipahami dengan baik oleh tenaga pendidik agar kurikulum 2013 berhasil diimplementasikan, sekaligus dijadikan indikator atas variabel tersebut. Adapun indikator atas variabel tingkat pemahaman

tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo tentang kurikulum 2013 dapat dioperasionalkan sebagai berikut.

1. Tujuan Kurikulum, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui implementasi kurikulum 2013, yang dirumuskan di atas landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Tenaga pendidik harus memahami indikator ini dengan baik, agar penyelenggaraan aktivitas belajar-mengajar sesuai dengan arah yang ditentukan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum 2013.
2. Rasionalisasi Kurikulum, urgensi dan signifikansi kurikulum 2013. Urgensi dapat dioperasionalkan sebagai alasan rasional yang mendesak, sehingga perlu dilakukan perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, baik atas sejumlah tantangan internal, tantangan eksternal, dan penyempurnaan pola pembelajaran yang mendesak perubahan/penyesuaian kurikulum yang berlaku. Signifikansi dapat dioperasionalkan sebagai alasan rasional mengapa suatu kurikulum penting bagi tenaga pendidik. Kedua hal ini, baik urgensi dan signifikansi yang merupakan sub indikator dari rasionalisasi kurikulum harus dipahami dengan baik oleh tenaga pendidik, demi keberhasilan implementasi kurikulum 2013.
3. Elemen Perubahan Standar Nasional Pendidikan, yakni sejumlah elemen dari delapan standar nasional pendidikan yang mengalami perubahan/penyesuaian, yang terdiri dari standar kompetensi kelulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Tenaga pendidik harus mampu memahami dengan baik masing-masing elemen standar perubahan ini, sehingga proses belajar-belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan ketentuan standar tersebut, yang

sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013, demi mencapai tujuan pendidikan nasional.

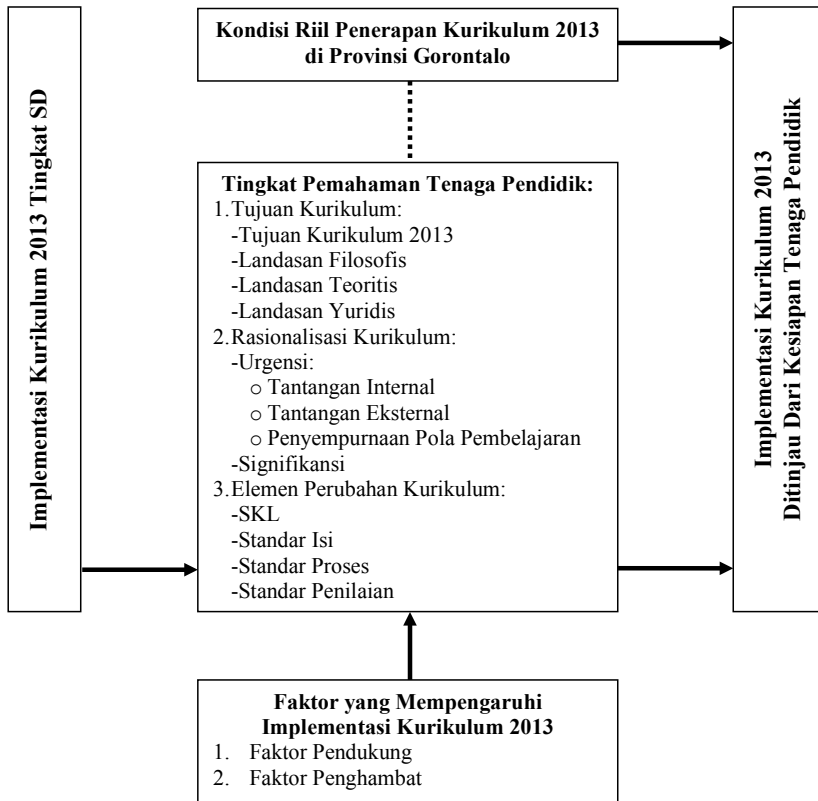
Selanjutnya, atas variabel faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo, pada dasarnya ditelusuri secara mendalam di lapangan penelitian. Hal ini selain untuk menjaga bias yang dapat ditimbulkan bila peneliti menentukan terlebih dahulu sejumlah faktor yang berpengaruh, juga agar telaah mengenai faktor-faktor berpengaruh benar-benar sesuai dengan kondisi riil yang dialami tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo dalam kerangka implementasi kurikulum 2013.

Sejumlah variabel penelitian, baik kondisi riil implementasi, tingkat pemahaman tenaga pendidik, maupun faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tenaga pendidik tersebut, pada dasarnya memiliki keterkaitan. Secara inheren, kondisi riil penerapan implementasi kurikulum 2013 dapat mencerminkan tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo, dikarenakan apa yang dipahami oleh tenaga pendidik tersebut lah yang mereka terapkan dalam aktivitas belajar-mengajar di SD dalam kerangka implementasi kurikulum. Selain itu, dari kondisi riil tersebut juga dapat ditelusuri faktor-faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat, sehingga kondisi riil implementasi kurikulum 2013 terjadi sebagaimana yang dideskripsikan. Hal ini yang menyebabkan mengapa kondisi riil implementasi kurikulum 2013 saat ini perlu dideskripsikan terlebih dahulu, baru kemudian kita menganalisis tingkat pemahaman beserta faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun suatu alur kerangka pikir yang disesuaikan untuk keperluan penelitian. Variabel kondisi riil implementasi kurikulum 2013 ditelusuri melalui

observasi secara langsung di lapangan dan telaah dokumen yang terkait dengan kondisi riil tersebut; variabel tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2013 dianalisis berdasarkan dimensi yang ditelusuri dalam tinjauan kurikulum 2013, yang terdiri dari tujuan, rasionalisasi kurikulum, dan elemen perubahan kurikulum; serta sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tenaga pendidik yang ditelusuri secara langsung dan berkembang di lapangan penelitian; yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar Kerangka Pikir



BAB VI

HASIL PENELITIAN PADA ARAS LOKAL

Observasi awal tentang implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati kegiatan diklat para guru SD kelas I , II, IV dan V di SDN 2 Kabila Kabupaten Bone Bolango yang diselenggarakan dengan dana APBD dan di SDN 61 Kota Timur Kota Gorontalo yang diselenggarakan dengan biaya APBN selama lima hari. Dari kesan peserta dalam diklat tersebut terungkap bahwa kurikulum 2013 sepertinya diimplementasikan secara terburu-buru. Awalnya peserta tidak paham dan justru bingung dengan kurikulum 2013. Namun setelah mengikuti pelatihan, kebingungan tersebut lama-kelamaan semakin berkurang.

Kegiatan diklat tersebut dilaksanakan oleh LPMP yang bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bone Bolango, yang utamanya ditujukan bagi para guru SD kelas I , II, IV dan V. Adapun peserta diklat yang sempat diwawancarai, antara lain Rustam Daulima, yang mengemukakan bahwa kurikulum 2013 lebih baik dibanding dengan kurikulum sebelumnya yakni KTSP, karena K-13 dengan sistem pembelajaran tematiknya langsung menyentuh pada diri siswa, sehingga membuat mereka lebih kreatif; hal inilah yang turut menyebabkan kami selaku guru

sangat senang menerapkannya. Selain itu, peneliti didampingi oleh anggota peneliti, yakni Hamka A. Husain, yang dari pengamatannya memberikan pemahaman bahwasanya peserta diklat sangat aktif, bersemangat, dan antusias dalam mengerjakan tugas (Observasi 04 Juli 2014).

Observasi lanjutan dilaksanakan pada kegiatan PLPG Tahap I dengan UKA 47 ke atas, yang pesertanya mewakili sepuluh Kabupaten/Kota dari Gorontalo dan Sulawesi Utara (delapan rombel). Tahap II dengan UKA 37 ke bawah (tujuh rombel). Tahap III dengan UKA 32 ke bawah sampai 15 (enam rombel). Adapun kegiatan PLPG ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Telaga Kabupaten Gorontalo, yang dimulai dari tanggal 2 Agustus s/d 2 September 2014. Setiap tahap kegiatan PLPG ini berlangsung sembilan hari.

Hasil observasi awal mensinyalir bahwa KTSP belum selesai/belum tuntas dilaksanakan, lantas muncul kurikulum 2013. Bahkan hadirnya kurikulum 2013 kian membuat bingung para guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas. Namun berkat sosialisasi dan diklat yang diikuti, masalah ini sedikit banyak dapat teratasi. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan hasil wawancara dengan peserta PLPG Universitas Negeri Gortontalo, yang mengesankan bahwa kurikulum 2013 dilaksanakan secara terburu-buru.

Lebih jauh. Dalam diklat tersebut, peserta PLPG mengemukakan bahwa awalnya mereka tidak paham dengan kurikulum 2013 sehingga mengalami kebingungan dalam mengimplementasikannya. Bahkan, terdapat beberapa peserta yang baru melihat kurikulum dan bukunya saat kegiatan PLPG, yang kemudian memahami bahwa kurikulum 2013 nampaknya berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yakni KTSP dan KBK.

Setelah mengikuti diklat K-13, peserta justru mengemukakan bahwa mereka senang dan paham bahwa kurikulum 2013 merupakan pengembangan, pelengkap, atau penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Namun, terdapat pula permasalahan yang mereka hadapi terutama yang berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran khususnya instrumen penilaian (Ujar Peserta PLPG tanggal 02 Agustus 2014).

a. Wawancara

Adapun hasil wawancara mendalam dengan sejumlah pejabat dari instansi terkait, dapat dikemukakan sebagaimana berikut:

1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (DIKBUDPORA)

Kegiatan wawancara dilakukan dengan Bapak Drs. H. Yahya Ichsan, M.A saelaku Sekretaris Dinas Dikbudpora, yang pada dasarnya merespon dengan baik implementasi kurikulum 2013. Beliau mengemukakan bahwa implementasi kurikulum 2013 merupakan hal baru yang harus dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah pusat saat ini fokus pada upaya agar semua sekolah dapat melaksanakan K-13 untuk tahun ajaran baru, yang mulai dijalankan dari SD Kelas I , IV, II, V; SMP Kelas VII, VIII; serta SMA/SMK Kelas X dan XII. Terkait hal ini, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah dan pendekatan agar daerah memiliki kesiapan dalam melaksanakan kurikulum 2013 tersebut.

Dengan adanya semangat dari pemerintah pusat, tentunya kita di daerah melalui LPMP, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota menyambut dengan baik kurikulum 2013 dan memang sudah sepatutnya melaksanakannya dengan ketersediaan hal-hal yang diperlukan, yang utamanya adalah

guru sasaran. Apakah mereka benar-benar sudah mengikuti diklat atau bimtek? Apakah sekolah-sekolah sudah siap melaksanakannya? Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Dinas Dikbudpora) dalam hal implementasi kurikulum 2013, mengambil peran untuk mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis. Namun kalau kegiatan diklat, tentu saja KORnya adalah LPMP; Tegas Sekretaris Dinas Dikbudpora Provinsi di ruang kerja (04 Juli 2014 pk 08.30).

Selanjutnya Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Dr. H. Weni Liputo, MM menyatakan bahwa untuk tahun ajaran 2014/2015, semua tingkat kelas pada jenjang tertentu sudah melaksanakan Kurikulum 2013 dari SD sampai SMA/SMK. Terkait guru SD, baik pegawai negeri maupun tenaga honor, sudah memiliki kompetensi dan pemahaman yang sama tentang Kurikulum 2013, sehingga pelatihan harus dilaksanakan secara *massif* agar semuanya bisa ter-cover.

Khusus untuk Sekolah Dasar atau ± 1450 orang yang belum teranggarkan, hal ini sementara diupayakan, baik melalui anggaran pusat maupun dengan mengoptimalkan anggaran kolaborasi pemerintah Kabupaten-Kota Gorontalo, yang diharapkan dapat tertuntaskan dengan baik. Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan pendampingan, dalam hal ini dikhawatirkan bahwa sekolah-sekolah yang jauh dan gurunya relatif terbatas akan mengalami kekosongan kelas pada saat mengikuti pelatihan, sehingga proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal (Wawancara Selasa, 08 Juli 2013 pk 14.15).

2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo (LPMP)

LPMP saat ini sedang gencar melaksanakan diklat di beberapa tempat, antara lain di SDN 2 Kabila Kabupaten Bone Bolango dan SDN 61 Kota Timur Kota Gorontalo yang berlangsung selama lima hari dengan biaya APBN maupun biaya mandiri (APBD), yang kemudian akan dilanjutkan lagi di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Kegiatan ini dilaksanakan secara kontinu guna merespon kebijakan pemerintah pusat sekaligus menyahuti implementasi kurikulum 2013 yang diterima dan dipahami secara merata di semua jenjang pendidikan, khususnya di Provinsi Gorontalo (Wawancara dengan Kasubag Umum, Bpk. Eky Aristanto.P. Punu, SE,MM diruang kerjanya 04 Juli 2014 pk 09.30).

3. Walikota Gorontalo

Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini wakil Walikota Bapak dr. Charles Budi Doku, menyatakan apresiasinya terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur terkait empat program yang dilaksanakan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Infrastruktur, dan (4) Ekonomi Kerakyatan. Khusus untuk pendidikan, saya atas nama pemerintah kota akan mengecek implementasi kurikulum 2013 melalui penelitian, yang kemudian hasilnya akan dikaji lagi, karena sebaiknya setiap program harus diteliti dulu supaya tidak mubazir (Ujar Wawali Kota Gorontalo, 04 Juli 2014, pk 11.00).

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang diwakili Sekretarisnya Bapak Yanson, mengemukakan bahwa tidak

ada permasalahan bagi Dinas Pendidikan Kota dalam hal implementasi kurikulum 2013, sebagaimana hal ini sudah dirintis oleh Pejabat Wali Kota Gorontalo Bapak Dr.H. Weni Liputo, MM. Bahkan, saat ini Kadis Kota Gorontalo Drs. Beni idrus, M.Pd, telah menyatakan secara tegas bahwa jika ada guru yang tidak mengimplementasikan kurikulum 2013, maka beliau mempersilahkan untuk memncari sekolah yang tidak ada kurikulum 2013. Motivasi dari Dinas Kota Gorontalo merupakan pelecut bagi semua guru dalam membenahi diri dan merubah *mindset* sesuai dengan perkembangan yang ada (Wawancara Rabu, 23 Juli 2014).

5. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Indra Yasin, SH, MH, di ruang kerjanya, menyambut baik tentang implementasi Kurikulum 2013 ini, karena hal ini adalah kepentingan pendidikan secara nasional dan sudah menjadi kebijakan nasional, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, mau tidak mau haruslah dilaksanakan. Beliau mengemukakan sangat antusias untuk memberikan kontribusi terhadap kesuksesan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diterapkan secara nasional disesuaikan dengan kemajuan masa kini agar tidak ketinggalan negara ini. Bupati Indra Yasin , SH,MH menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk Gorontalo Utara, ujanya (Selasa 08 Juli 2014).

6. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Kepala Dinas yang diwakili Korwas Bapak Hamka Manoppo di ruang kerjanya sangat optimis dengan implementasi Kurikulum 2013 ini, karena untk merubah mind set guru

dilakukan sosialisasi dan diklat di semua jenjang baik yang didanai oleh APBN maupun oleh APBD. diharapkan diklat Kurikulum 2013 ini selesai seluruhnya tanggal 14 Juli 2014, dan buku yang menjadi pendukung dalam pembelajaran sudah dipesan, semoga cepat sampai, sehingga tahun ajaran baru sudah dapat dilaksanakan secara baik tuturnya (08 Juli 2013).

7. Kepala daerah Kabupaten Gorontalo

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo wakil Bupati Bapak Tonny Yunus, S.Kom, MA di ruang kerjanya mengemukakan bahwa dampak sekolah gratis membuat orang tua acuh tak acuh dalam menyekolahkan anaknya. Jadi bukan merupakan beban lagi apakah anak ini belajar atau tidak. Tanggapan wakil bupati sekolah di Indonesia dan di luar negeri sangat berbeda, karena di Indonesia terlalu banyak mata pelajaran yang kegiatannya banyak menghapal. Namun dengan adanya implementasi Kurikulum 2013 semoga kegiatan pembelajaran lebih baik, berkarakter, dan anak-anak tidak terbebani banyak mata pelajaran (08 Juli 2013 pk 12.00).

8. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo

Kepala Dinas diwakili sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Drs. Yasin Alitu, M.Pd di ruang kerjanya menyatakan bahwa implementasi Kurikulum 2013 sepertinya tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Kepala Sekolah, Pengawas, maupun para guru kelas I dan Kelas IV khususnya jenjang Sekolah Dasar sudah mengikuti pelatihan yang diawali dengan sosialisasi untuk seluruh jenjang, jadi begitu mereka mengikuti Diklat tidak merasa kaget dengan Kurikulum 2013. Permasalahan

sekarang adalah buku belum ada , baik buku pedoman Guru maupun paket siswa (wawancara 08 Juli 2014).

9. Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango Bapak Hamim Pou, S.Kom, MH mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 perlu banyak sosialisasi yakni membelakan kepada para guru, karena hal ini hal yang baru, haruslah diadakan pelatihan dua kali lipat untuk menunjang ke 45 Indonesia Emas. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sangat merespon dan mensupport implementasi Kurikulum 2013 ini dengan spontan menyatakan dengan menyiapkan anggaran untuk itu. Jadi tidak ada masalah dengan anggaran, pemerintah Bone Bolango lebih dahulu melaksanakan Diklat Implementasi Kurikulum dengan dana APBD, tandas Bupati (wawancara 23 Juli 2014).

10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Ibu Hj. Marni Nisabu, S.Pd, MM , mengemukakan bahwa Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baik . Kurikulum yang mengikuti perkembangan, Kabupaten Bone Bolango yang pertama melaksanakan Diklat Implementasi Kurikulum 2013 secara mandiri, disamping dana dari APBN. Untuk buku saat ini informasi dalam taraf pengiriman, namun sudah ada CD di sekolah-sekolah yang sudah diedarkan, semoga tahun ajaran baru bukunya sudah ada dan dapat digunakan oleh para guru, Kadis tinggal koordinasi saja(wawancara 23 Juli 2014).

Selanjutnya Kadis Kabupaten Bone Bolango Marni Nisabu menyatakan bahwa penerapan Kurikulum 2013 di daerah ini berjalan dengan lancar tanpa ada persoalan yang

berarti. Menurutnya bahwa sejak awal penerapan Kurikulum 2013 pihaknya memang optimis prosesnya akan berjalan lancar, baik dari pendistribusian buku maupun kapasitas atau pemahaman guru. Untuk pendistribusian buku, pihaknya telah membagikan compact disc (CD) kepada para siswa yang belum mendapatkan buku, sementara gurupun mendapatkan pendampingan.

Para guru tidak mengalami kesulitan saat mengajar dengan menerapkan Kurikulum 2013 karena ada pendamping. Kadis mendambakkan proses pendistribusian buku Kurikulum 2013 hingga saat ini masih terus berlangsung, demikian juga dengan pendampingan untuk para guru. Untuk pendistribusian buku, prosesnya menggunakan jasa pihak ketiga, sementara pendampingan untuk guru pihaknya memberdayakan para guru yang berprestasi di daerah itu. Para guru berprestasi yang ditunjuk sebagai pendamping ini sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu, ujar bu Marni (antaragorontalo.com).

11. Kepala Daerah Kabupaten Boalemo

Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo diwakili Sekda Bapak Drs. H. Sujarno Abdul Hamid di ruang kerjanya mengemukakan bahwa penelitian ini lebih spesifik dan terfokus apa yang diteliti maka kembalikan ke Budaya yakni karakter, karena karakter itu lewat budaya. Implementasi Kurikulum 2013 itu basisnya karakter, dimulai dari kebiasaan bisa mendarahdaging, lama kelamaan jadi terbiada dan membudaya. Jadi mengembalikan ke rel yang benar sehingga nilai-nilai dasar terpahami dan terpelihara terus serta terwujud dalam kehidupan sehari-hari (wawancara Kamis, 14 Agustus 2014 pk 13.00).

12. Kepala Dinas Kabupaten Boalemo

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo diwakili Kabid Dikmen Bapak Roni Tamingo, S.Pd di ruang kerjanya menyatakan bahwa dalam hal memperkuat implementasi Kurikulum 2013 disiapkan dana untuk kegiatan pendampingan . Untuk mempersiapkan tenaga pendidik LPMP sudah melaksanakan Diklat bagi para guru dengan dana APBN dan kolaborasi dengan Pemda dengan dana APBD (wawancara 14 Agustus 2014).

13. Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato diwakili oleh Bagian Umum , karena semua pejabat tidak ada ditempat, diarahkan ke Diknas Kabupaten Pohuwato.

14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pohuwato diwakili oleh Kasi Kurikulum Dikmen Bapak Rais Mukmin, S.Pd mengemukakan bahwa untuk sekolah-sekolah sasaran guru-gurunya sudah terpanggil semianya mengikuti sosialisasi maupun Diklat. Kesulitan yang dihadapi dalam implementaasi Kurikulum 2013 adalah merubah pola pikir guru itu susah, karena rumitnya penialain yang mengacu pada penilaian proses, dan mengharapkan peran aktif dari guru yang bersangkutan. Untuk buku masih diberikan dalam bentuk CD yang diperbanyak (wawancara 15 Agustus 2014).

BAB VII

STUDI KASUS LOKAL

Secara umum peneliti dapat mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo rata-rata sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013. Para Guru kelas I dan Kelas IV setuju dengan Kebijakan Pemerintah tentang Implementasi Kurikulum 2013, siap mengimplementasikan Kurikulum 2013. Hal ini didukung dengan kegiatan sosialisasi dan Diklat yang telah diikuti oleh para guru kelas I dan Kelas IV yang diselenggarakan oleh LPMP dengan baik itu melalui biaya APBN maupun APBD yang terprogram secara bertahap dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten – Kota Provinsi Gorontalo. Sosialisasi dan Diklat Kurikulum 2013 ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam memberikan wawasan dan pemahaman kepada para guru bagaimana mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran.

Dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 tentunya diawali dengan analisis buku guru dan buku siswa kemudian dilanjutkan dengan penyusunan perangkat pembelajaran : pemetaan kompetensi, analisis silabus, penyusunan RPP, Penyusunan bahan ajar, penyusunan LKPD , penetapan media pembelajaran, penyusunan instrumen penilaian yang dilengkapi

dengan pedoman penskoran dan rubrik penilaian. Disela-sela penyusunan perangkat ini terdapat beberapa guru mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian. Namun berkat kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan Diklat bahkan dilanjutkan dengan kegiatan KKG hal ini sedikitnya teratasi.

Berbagai faktor yang sangat mendukung implementasi Kurikulum 2013 yakni adanya instruktur yang berkompeten, buku pedoman guru, buku paket siswa, sehingga dapat memudahkan dalam pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat juga faktor yang dapat menghambat implementasi kurikulum ini yakni kemampuan guru yang bersangkutan yang hanya menunggu bola, tidak punya inisiatif dan kurang kreatif dalam pembelajaran.

Sesuai wawancara dan kuisisioner yang diedarkan oleh peneliti kepada para guru kelas I dan Kelas IV dinyatakan bahwa tidak mudah mengimplementasikan Kurikulum 2013 terutama masalah pembelajarannya dalam satu hari, waktunya tidak cukup, banyak kegiatan yang dilakukan, sehingga para siswapun sulit menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, dan pada akhirnya menjadi pekerjaan rumah untuk siswa.

Para tenaga pendidik atau guru SD kelas I dan Kelas IV ternyata Sebagian besar menyukai adanya implementasi Kurikulum 2013. Mereka menyatakan dengan menerapkan Kurikulum 2013 para siswa aktif, senang belajar dengan pendekatan saintifik yang dimulai dengan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan atau membangun jejaring antar muatan mata pelajaran, dilengkapi dengan penilaian autentik.

Guru kelas I dan kelas IV menyatakan dalam pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik, siswa dapat menemukan sendiri bagaimana cara memecahkan suatu masalah dengan

menggunakan komponen-komponen mengamati, menanya, menalar dan mencoba, dan mengkomunikasikan.

Temuan khusus yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah dengan implementasi Kurikulum 2013 tenaga pendidik dalam hal ini para guru di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo di satu sisi sangat antusias dalam menyambut datangnya Kurikulum 2013. Namun di lain sisi dalam merancang perangkat pembelajaran utamanya dalam instrumen penilaian agak sulit dan ribet dalam menyusunnya. Para guru mengalami kesulitan menyusun instrumen tersebut, sehingga menjadi beban buat mereka setiap merancang pembelajaran.

Terdapat sekolah-sekolah sasaran yang belum menerima buku pedoman guru maupun buku siswa diantaranya SDN di Kota Tengah Kota Gorontalo, SDN di Kabupaten Gorontalo, SDN di Kabupaten Pohuwato. Untuk mengantisipasi hal ini mereka mengcopi buku yang diperoleh dari Diklat, namun hasil kopian tersebut kurang menarik siswa karena gambarnya hitam putih. Ada juga CD namun terdapat sebagian guru yang masih sulit mengoperasikan komputer/laptop, sehingga mengalami kendala dalam pembelajaran. Belum lagi banyaknya tuntutan administrasi, sehingga para guru paling banyak disibukkan dengan administrasi tersebut sehingga mengakibatkan guru kurang fokus dalam pelaksanaan pembelajaran, karena sudah kecapean.

Tidak semua calon siswa yang masuk ke SD berasal dari Taman Kanak-kanak (TK) sehingga sulit untuk membaca, menulis dan menghitung. Terdapat guru yang mengajar berkeahlian Non Kependidikan (Ilmu Murni seperti Sarjana Ekonomi, bahkan ada guru yang belum berkualifikasi S1, ada yang masih status D-II, ada guru tidak tetap (GTT, tetapi dalam menerima kebijakan pemerintah mereka setuju, paham dalam implementasi

Kurikulum 2013, mereka sudah mengikuti sosialisasi, bahkan telah mengikuti diklat implementasi Kurikulum 2013 baik melalui dana APBN maupun dana APBD. Untuk lebih jelasnya sekolah-sekolah sasaran dari implementasi Kurikulum 2013 di Kabupaten – Kota Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1

SEKOLAH SASARAN K-13 DI SDN PROPINSI GORONTALO
(Tenaga Pendidik Kelas I /IV)

No	Sekolah	Nama Guru	Kls		Kegiatan		Sumber Dana	
			I	IV	Sosialisasi	Diklat	APBN	APBD
	SDN 1 Tilamuta	Raplin H	v		v	v	v	
		Hartati I	v		v	v	v	
		Yamin A		v	v	v	v	
		Yolan R		v	v	v	v	
	SDN 15 Tilamuta	Kristina L	v		v	v	v	
		Syaiful B		v	v	v	v	
	SDN 8 Paguyaman	Rabia D	v		v	-	-	
		Dewice B		v	v	v		
	SDN 2 Paguyaman	Indra G	v		v	v	v	
		Herman I.		v	v	v	v	
	SDN 7 Paguyaman	Fitriyanti	v		v	v	v	
		Vonny L		v	v	v	v	
		Wely T		v	v	v	v	
	SDN 7 Tibawa	Kartin H	v		v	v	v	
		Sutrisna K		v	v	v	v	
	SDN 12 Tibawa	Rita K. O	v		v	v	v	
		Habiba T		v	v	v	v	
	SDN 8 Tibawa	Evi H	v		v	v	v	
		Lisnawati		v	v	v	v	
	SDN 14 Tibawa	Yusni L	v		v	v	v	
		Iin L		v	v	v	v	
	SDN 2 Tabongo	Rubianti	v		v	v	v	
		Karsum T		v	v	v	v	

SDN 2 Botubilotahu	Ningsi P	v		v	v	v	
	Hasna B	v		v	v	v	
	Nining T	v		v	-	-	
	Abd.Talib		v	v	v	v	
	Marlan Y		v	v	v	v	
SDN Inpres Banuroja	Suyatun Ni Wayan	v	v	v	v	v	
SDN 1 Marisa Selatan	Yulla N. A	v		v	v	-	
	Warni G	v		v	v	-	
	Ningsih Dj		v	v	-	-	
	Endang B		v	v	v	-	
SDN Ayula	Rusna S	v		v	v	v	
	Selvi H		v	v	v	v	
SDN 8 Kabila Bone	Asna P	v		v	v	v	
	Sriratmi P		v	v	v	v	
SDN 1 Bone	Puspita N	v		v	v	v	
	Hantiman		v	v	v	v	
SDN 5 Bulango Selatan	Amna D	v		v	v	v	
	Dian P		v	v	v	v	
SDN 3 Bulango Timur	Fatma M	v		v	v	v	
	Ningsi Dj		v	v	v	v	
SDN 2 Ponelo	Harmisah	v		v	v	v	
	Riyenti N. L		v	v	v	v	
SDN 1 Deme	Darisna	v		v	v	v	
	Sersi P		v	v	v	v	
SDN 2 Tititdu	Arpan Y	v		v	v	v	
	Maryam S		v	v	v	v	
SDN 2 Leboto	Hasna V	v		v	v	v	
	Asra B		v	v	v	v	
SDN 1 Molingapoto	Selvi K	v		v	v	v	
	Riasni P	v		v	v	v	
	Rita A		v	v	v	v	
SDN 102 Kota Utara	Saripa I	v		v	v	v	
	Sri Hajati		v	v	v	v	
SDN 82 Kota Tengah	Asma M	v		v	v	v	
	Ferawati Al	v		v	v	v	
	Ronald L		v	v	v	v	
	Warni		v	v	v	v	

SDN 85 Kota Tengah	Aisa T	v		v	v	v	
	Karsum A	v		v	v	v	
	Hapit K		v	v	v	v	
	Ahmad K		v	v	v	v	
SDN 93 Sipatana	Hadidjah A	v		v	v	v	
	Amna H		v	v	v	v	
	Erni K		v	v	v	v	
SDN 17 Kota Barat	Ragustian	v		v	v	v	
	Yanto P		v	v	v	v	
SDN 24 Duingingi	Rosmawati	v		v	v	v	
	Drs. Gafar		v	v	v	v	
SDN 30 Kota Selatan	Irni Y	v		v	v	v	
	Fitri D	v		v	v	v	
	Yuni B	v		v	v	v	
	Sri Dewi	v		v	v	v	
	Meity P		v	v	v	v	
	Fidyawati		v	v	v	v	
	Budiharti R		v	v	v	v	
SDN 33 Kota Selatan	Risko S	v		v	v	v	
	Fatma M	v		v	v	v	
	Marina U		v	v	v	v	
	Siske Y		v	v	v	v	
SDN 46 Hulontalangi	Yusni M	v		v	v	v	
	Aifa S	v		v	v	v	
	Siyati H		v	v	v	v	
	Taufik		v	v	v	v	
	Moh Id		v	v	v	v	
SDN 61 Kota Timur	Maryam S	v		v	v	v	
	Rasuna H	v		v	v	v	
	Linda M	v		v	v	v	
	Zenab M		v	v	v	v	
	Lusiana R		v	v	v	v	
SDN 77 Kota Tengah	Darmawati	v		v	v	v	
	Karto N		v	v	v	v	
SDN 80 Kota Tengah	Liek I	v		v	v	v	
	Silfoni P		v	v	v	v	
	Astin R		v	v	v	v	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sekolah-sekolah sasaran dari Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo sejumlah 33 SD yang dapat dijangkau dengan jumlah

responden kelas I dan kelas IV bervariasi, ada yang data awal paralel, ternyata ditemukan dilapangan tidak paralel, sementara yang data awal yang tidak paralel, namun ditemukan paralel sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala-kepala SD di wilayah Kabupaten – Kota Provinsi Gorontalo. Untuk jumlah respon yang dapat dijangkau 94 responden, masih 4 responden yang tidak muncul dalam rekapitan tabel di atas yakni 2 Sekolah sasaran (SD Negeri 1 Bone kelas I : 1 responden kelas IV: 1 responden dan untuk SD Negeri 1 Deme kelas I : 1responden , kelas IV : 1 responden), sehingga jumlah totalnya 98 responden dan 35 sekolah sasaran.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kesiapan dari tenaga pendidik yakni para guru sasaran Kurikulum 2013 di sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo yang dijangkau lewat kuisioner yang didarkan kepada sejumlah responden sesuai dengan lokus penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 4.2

HASIL KUISIONER IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DITINJAU DARI KESIAPAN TENAGA PENDIDIK DI SDN
PROVINSI GORONTALO

No	Nama Responden	Aspek yang dinilai										Jlh Skor	%	Kategori
		Kebijakan Pemerintah		Paham K 13		Implements K 13		Sosialisasi		Diklat				
		S	TS	S	TS	S	TS	Ya	Tdk	Ya	Tdk			
		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0			
	Raplin H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Hartati I	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Yamin A	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Yolan R	v		-	v	v		v		v		4	80	Siap
	Kristina L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Syaiful B	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Rabia D	v		v		v		v		-	v	4	80	Siap
	Dewice B	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Indra G	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Herman I	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Fitriyanti	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Vonny L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Wely T	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Kartin H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Sutrisna	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Rita K	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Evi H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Lisna	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Habiba	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Yusni L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Iin L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Rubi	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Karsum	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Ningsi P	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Hasna B	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Nining T	v		v		v		v		-	v	4	80	Siap
	Abd.Talib	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Marlan Y	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Suyatun	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Ni Wayan	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Yulla N.	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Warni G	v		v		v		v		v		5	100	Siap
	Ningsih	v		v		v		v		v		5	100	Siap

	Endang B	v		v		v		v		5	100	Siap
	Rusna S	v		v		v		v		5	100	Siap
	Selvi H	v		v		v		v		5	100	Siap
	Asna P	v		v		v		v		5	100	Siap
	Sriratmi	v		v		v		v		5	100	Siap
	Puspita N	v		v		v		v		5	100	Siap
	Hantiman	v		v		v		v		5	100	Siap
	Amna D	v		v		v		v		5	100	Siap
	Dian P	v		v		v		v		5	100	Siap
	Fatma M	v		v		v		v		5	100	Siap
	Ningsi Dj	v		v		v		v		5	100	Siap
	Harmisah	v		v		v		v		5	100	Siap
	Riyenti N	v		v		v		v		5	100	Siap
	Darisna	v		v		v		v		v	100	Siap
	Sersi P	v		v		v		v		v	100	Siap
	Arpan Y	v		v		v		v		5	100	Siap
	Maryam	v		v		v		v		5	100	Siap
	Hasna V	v		v		v		v		5	100	Siap
	Asra B	v		v		v		v		5	100	Siap
	Selvi K	v		v		v		v		5	100	Siap
	Riasni P	v		v		v		v		5	100	Siap
	Rita A	v		v		v		v		5	100	Siap
	Saripa Ib	v		v		v		v		5	100	Siap
	Sri Hajati	v		v		v		v		5	100	Siap
	Asma M	v		v		v		v		5	100	Siap
	Ferawati	v		v		v		v		5	100	Siap
	Ronald L	v		v		v		v		5	100	Siap
	Warni	v		v		v		v		5	100	Siap
	Aisa T	v		v		v		v		5	100	Siap
	Karsum	v		v		v		v		5	100	Siap
	Hapit K	v		v		v		v		5	100	Siap
	Ahmad K	v		v		v		v		5	100	Siap
	Hadidjah	v		v		v		v		5	100	Siap
	Amna H	v		v		v		v		5	100	Siap
	Erni Kadir	v		v		v		v		5	100	Siap
	Ragustian	v		v		v		v		5	100	Siap
	Yanto P	v		v		v		v		5	100	Siap
	Rosmawat	v		v		v		v		5	100	Siap
	Drs. Gafar	v		v		v		v		5	100	Siap
	Irni Y	v		v		v		v		5	100	Siap
	Fitri D	v		v		v		v		5	100	Siap
	Yuni B	v		v		v		v		5	100	Siap
	Sri Dewi	v		v		v		v		5	100	Siap
	Meity P	v		v		v		v		5	100	Siap
	Fidyawati	v		v		v		v		5	100	Siap

Budiharti	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Risko S	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Fatma M	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Marina U	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Siske Y	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Yusni M	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Aifa S	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Siyati H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Taufik	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Moh I	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Maryam S	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Rasuna H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Linda M	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Zenab M	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Lusiana	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Darm	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Karto N	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Liek I	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Silfoni	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Astin R	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Jumlah	98		97		98		98		96			9740	
Persentase	100		98.98		100		100		97.96			99.39%	

Keterangan:

Tenaga pendidik yang siap 100% sejumlah 95 orang (96.94%)

Tenaga Pendidik yang siap 80% sejumlah 3 orang (3.06%)

Interpretasi data hasil penelitian tentang implementasi Kurikulum 2013 :

Nilai persentase =

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga pendidik yang siap Implementasi K 13} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh tenaga pendidik sekolah sasaran K 13}}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang diedarkan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo pada aspek kebijakan pemerintah rata-

rata tenaga pendidik atau para guru sejumlah 98 orang (100%) setuju menerima kebijakan pemerintah tentang Implementasi Kurikulum 2013 tersebut. Pada aspek keterpahaman dari Kurikulum 2013 dilihat dari jawaban responden sejumlah 97 orang (98.98%) paham tentang karakteristik Kurikulum 2013. Pada aspek kesiapan mengimplementasikan Kurikulum 2013 terdapat sejumlah 98 orang responden (100%) antusias melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk aspek mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 sejumlah 98 orang (100%) responden telah mengikuti sosialisasi tentang implementasi Kurikulum 2013. Sementara untuk Diklat sejumlah 96 orang (97.96 %) telah mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh LPMP dengan dana APBN. Sedangkan sejumlah 2 orang (2.04%) yang belum mengikuti Diklat Implementasi Kurikulum 2013 karena yang bersangkutan (1 orang) baru pindah ke sekolah yang menjadi sasaran Kurikulum 2013 tersebut, dan 1 orang lagi pada saat Diklat dalam keadaan sakit. Dengan demikian dapat dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara dan kuisioner yang diedarkan bahwa umumnya tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013.

BAB VIII

PEMAHAMAN TENAGA PENDIDIK TENTANG KURIKULUM 2013

Tenaga pendidik (guru) harus memahami kurikulum 2013 dengan sempurna. Sebab kurikulum merupakan sarana atau arena dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan secara sistematis berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya akan menentukan macam lulusan suatu lembaga pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, maka sebagai lembaga pendidikan harus melaksanakan kurikulum.

Sesuai hasil wawancara dan analisis kuisioner yang diedarkan kepada responden mengenai pemahaman tentang kurikulum 2013 umumnya tenaga pendidik sudah paham mengenai karakteristik dari kurikulum tersebut, dari 98 responden semuanya 98 orang 100% menyatakan diri sudah memahami kurikulum 2013.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran tenaga pendidik dalam hal ini guru dalam mengimplementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo sangat diharapkan. Olehnya itu perlu kesiapan-kesiapan yang matang mengikuti sosialisasi yang serius, mengikuti Diklat yang benar, bersemangat dan antusias agar dapat memiliki kompetensi yang diharapkan.

Tenaga pendidik (guru) dalam dunia pendidikan adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan mulai dari jalur anak usia dini, jalur pendidikan, pendidikan dasar, dan menengah (Suprihatiningrum, 2012 : 24). Oleh karena itu, demi mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan kreatif maka gurulah yang memegang peranan penting dalam pembelajaran terutama dalam menerapkan kurikulum sebagai pedoman ataupun acuan dalam merancang perangkat pembelajaran. Sehebat apapun kurikulum kalau ditangan guru yang tidak hebat, tidak kreatif maka tidak akan berhasil pembelajaran. Olehnya itu untuk mengantisipasi nya membuat guru yang kreatif sangat diperlukan bimbingan dan latihan secara kontinu dan berkelanjutan demi pengembangan profesionalisme guru yang bersangkutan apakah melalui Diklat, studi lanjut, seminar ilmiah, diskusi panel, kelompok kerja guru, simposium, lokakarya, workshop maupun karya yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang nantinya akan berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan umum dan temuan khusus dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Terdapat faktor yang dapat mendukung penerapannya, ada juga faktor yang menghambat pelaksanaan Kurikulum tersebut, sehingga menyebabkan ketidakberhasilan dalam pembelajaran.

Tenaga pendidik (guru) adalah merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam implementasi Kurikulum, bahkan sangat menentukan berhasil dan tidaknya peserta didik dalam belajar. Kalau dilihat dari program pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutui Pendidikan

(LPMP) dengan instansi yang terkait baik dengan dana APBN ataupun APBD dalam rangka mempersiapkan sekolah dan guru sasaran untuk menerapkan Kurikulum 2013, maka secara teoritis tenaga pendidik atau para guru Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo dapat dinyatakan siap.

Untuk melihat dan mengetahui bahwa tenaga pendidik atau para guru sasaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo tahap I: kelas I dan kelas IV untuk tahun 2013 sudah menyatakan siap, maka disini pemerintah dalam hal ini LPMP dan instansi yang terkait mengadakan upaya-upaya yakni mengadakan sosialisasi bahkan Diklat yang dapat merubah pola pikir dan mengarahkan untuk menjadikan para guru sasaran ini untuk siap dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 tersebut. Adapun usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) kerjasama dengan instansi yang terkait secara bertahap menyelenggarakan Diklat Kurikulum 2013 untuk Tahap I : kelas I dan IV bulan Juli tahun 2013, Tahap II kelas II dan V bulan Juli 2014, Tahap III : kelas III dan kelas VI bulan Juli tahun 2015, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Bagi tenaga pendidik (para guru) yang belum memahami Kurikulum 2013 maka usaha LPMP, instansi yang terkait : Dinas Dikbutpora, Dinas Kabupaten - Kota, Pemda Kabupaten – Kota kolaborasi dengan kepala sekolah mengikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi dan Diklat.
2. Selain itu juga Kepala Dinas Kabupaten – Kota dan kepala sekolah mengharuskan para guru yang belum mengerti dan belum mengimplementasikan kurikulum 2013 diwajibkan mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang berkaitan dengan perbaikan proses dan hasil pembelajaran,

pendekatan, Model maupun metode pembelajaran yang inovatif.

3. Kepala Dinas mengawasi secara rutin semua kegiatan di atas, dan mewajibkan kepada semua tenaga pendidik (Guru) mulai dari Guru SD sampai SMA/SMK menerapkan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran di kelas. Bahkan ada Kepala Dinas secara spontan mengemukakan: Jika seandainya ada tenaga pendidik yang tidak mengimplementasikan Kurikulum 2013 , secara tegas dinyatakan silakan cari sekolah yang tidak implementasi Kurikulum 2013.

BAB IX

HARAPAN BESAR IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Postingian oleh Fathur Rokhman (07/31/2013) bahwa Kurikulum 2013 resmi diberlakukan di 6.329 sekolah dari jenjang SD hingga SMA di Indonesia mulai 15 Juli 2013. Di Jawa Tengah, berdasar data Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum 2013 (Epik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk 877 sekolah sebagai sekolah sasaran pemberlakuan kurikulum baru. Meskipun masih ada kontroversi, visi luhur kurikulum 2013 sangat menarik untuk dikaji.

Di tengah pro dan kontra terkait implementasi Kurikulum 2013, pemerintah tentu punya harapan besar untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik. Pembenaan ini sudah seyogianya didukung oleh segenap elemen pendukung pendidikan. Para pendidik, akademisi, termasuk lembaga perguruan tinggi kependidikan (LPTK) harus bersama melakukan penguatan.

Dari tujuan tersebut, paradigma yang kemudian harus dibangun adalah berupaya sinergis, menyiapkan berbagai sarana penunjang termasuk kompetensi tenaga pendidik agar lebih siap dalam mengaplikasikan kurikulum baru. Dalam hal ini, pemerintah tentu tidak bisa sendirian dalam merealisasikan

pembenahan sistem pendidikan. Tanpa dukungan segenap lini, pendidikan yang lebih baik hanyalah angan-angan belaka.

Memang, melalui media kita masih saja melihat kekurangan bahan ajar dan kekurangsiapan berbagai komponen pendukung implementasi kurikulum 2013. Di berbagai daerah, masih saja terjadi kekurangan buku pelajaran sebagai piranti utama pembelajaran. Di Jawa Tengah, misalnya pada jenjang SMA, sekolah baru menerima buku dari tiga mapel, sedangkan SMP untuk mapel agama belum tersedia. Akan tetapi, hal tersebut sudah semestinya tidak menjadi hambatan karena pendidik dapat mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk membuat silabus pembelajaran, sesuai dengan Permendikbud No 69 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 (SM, 20/7/13).

A. Kompetensi Utama

Sebagaimana sering dikemukakan oleh Mendikbud Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh dalam berbagai kesempatan, Kurikulum 2013 telah dirancang sedemikian rupa agar siswa mampu meraih kompetensi utama, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor). Kompetensi tersebut diharapkan dapat menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah memandang perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 merupakan ikhtiar dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

Di antara keunggulan kurikulum 2013, pada jenjang SD/MI, pembelajaran dilakukan dengan metode tematik-integratif. Guru disyaratkan mampu mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema yang berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Pada jenjang SMP/MTs,

organisasi Kompetensi Dasar kurikulum dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antarkelas dan keharmonisan antarmata pelajaran. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran sehingga struktur Kurikulum SMP/MTs menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran dan jumlah materi berkurang.

Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah Kompetensi Dasar, guru tentu memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan pengamatan, bertanya, berasosiasi, dan berkomunikasi. Karena peserta didik mungkin belum terbiasa, proses pembelajaran yang dikembangkan guru menuntut kesabaran karena menunggu respon. Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Waktu yang dilalui guru bersama murid pun menjadi lebih lama, sehingga diharapkan proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal.

B. Maksimalkan Peran

Dari perihal teknis di atas, terungkap betapa kolaborasi siswa dan guru begitu kentara. Semenjak pendidikan dasar, siswa sudah diharapkan mampu membangun pola interaksi yang baik dengan sesama dan diajak peka terhadap apa yang ada di sekitarnya. Supaya hasil maksimal, guru tentu dituntut selalu berinovasi dalam pembelajaran.

Dalam ranah tersebut, LPTK sudah seyogianya memberikan penguatan. Pelatihan terhadap tenaga pendidik, di luar tanggung jawabnya mencetak tenaga pendidik yang mumpuni, merupakan

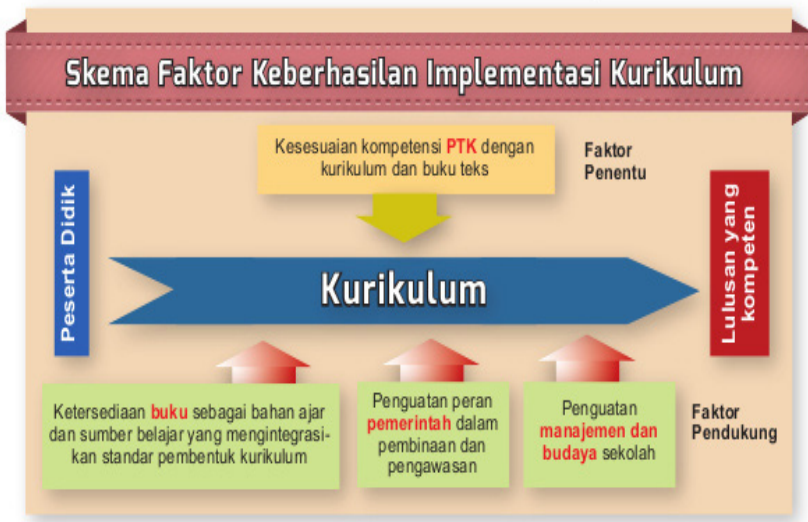
kewajiban mendasar. Hal inilah yang membuat LPTK mampu memaksimalkan peran dalam ranah kependidikan.

Pada kenyataannya, Kurikulum 2013 memiliki visi yang luhur, yaitu tidak sekadar menenempatkan siswa sebagai objek akademik yang berilmu, tetapi lebih dari itu, karakter dan soft skills sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk berbudaya teramat penting untuk disematkan.

Bagai kapal induk yang melaju, Kurikulum 2013 adalah sebuah harapan besar ke depan. Dengan mengoptimalkannya, kita telah menjadi bagian yang senantiasa memperteguh cita-cita mulia pendidikan Indonesia. Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 menjadi angin segar bagi capaian cita-cita Generasi Indonesia Emas 2045. Semoga Allah Tuhan yang Maha luas ilmuNya meridhoi ikhtiar kita semua (Fathur Rokhman, 2013 dalam kemdikbud.go.id).

Dalam penyiapan tenaga pendidik (guru) sangat memerlukan kolaborasi yang baik antar komponen yang terkait agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk mengetahui faktor keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat pada skema berikut ini.

Skema : Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2013



Terkait dengan faktor pertama, Kemdikbud sudah mendesain strategi penyiapan guru sebagaimana digambarkan pada skema penyiapan guru yang melibatkan tim pengembang kurikulum di tingkat pusat; instruktur diklat terdiri atas unsur dinas pendidikan, dosen, widyaiswara, guru inti, pengawas, kepala sekolah; guru utama meliputi guru inti, pengawas, dan kepala sekolah; dan guru mereka terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran SD, SMP, SMA, SMK.

Pada diri guru, sedikitnya ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013, yaitu kompetensi pedagogi; kompetensi akademik (keilmuan); kompetensi sosial; dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan.

Kesiapan guru lebih penting daripada pengembangan kurikulum 2013. Kenapa guru menjadi penting? Karena dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Melalui empat tujuan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Disinilah guru berperan besar di dalam mengimplementasikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Guru ke depan dituntut tidak hanya cerdas tapi juga adaptif terhadap perubahan (kemdiknas.go.id).

Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013, terdapat dua faktor yang dapat menentukan keberhasilan kurikulum 2013 antara lain: Pertama, faktor penentu, yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Kedua, faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, yakni :

1. Ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum;
2. Penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; dan
3. Penguatan manajemen dan budaya sekolah.

Terkait dengan faktor pertama, Kemdikbud sudah mendesain strategi penyiapan guru sebagaimana digambarkan pada skema penyiapan guru yang melibatkan tim pengembang kurikulum di tingkat pusat; instruktur diklat terdiri atas unsur dinas pendidikan, dosen, widya swara, guru inti, pengawas, kepala sekolah; guru

utama meliputi guru inti, pengawas, dan kepala sekolah; dan guru mereka terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran SD, SMP, SMA, SMK (Posted Wed, 12/26/2012 - 10:11 by sidiknas). Untuk penyiapan tenaga pendidik (guru) dapat dilihat pada skema strategi penyiapan guru.

Pada dasarnya pada setiap tenaga pendidik (guru) haruslah memiliki empat kompetensi yang diberi porsi atau perhatian khusus dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 , yakni:

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi akademik (keilmuan);
3. Kompetensi sosial; dan
4. Kompetensi manajerial atau kepemimpinan.

Skema : Strategi Penyiapan Guru

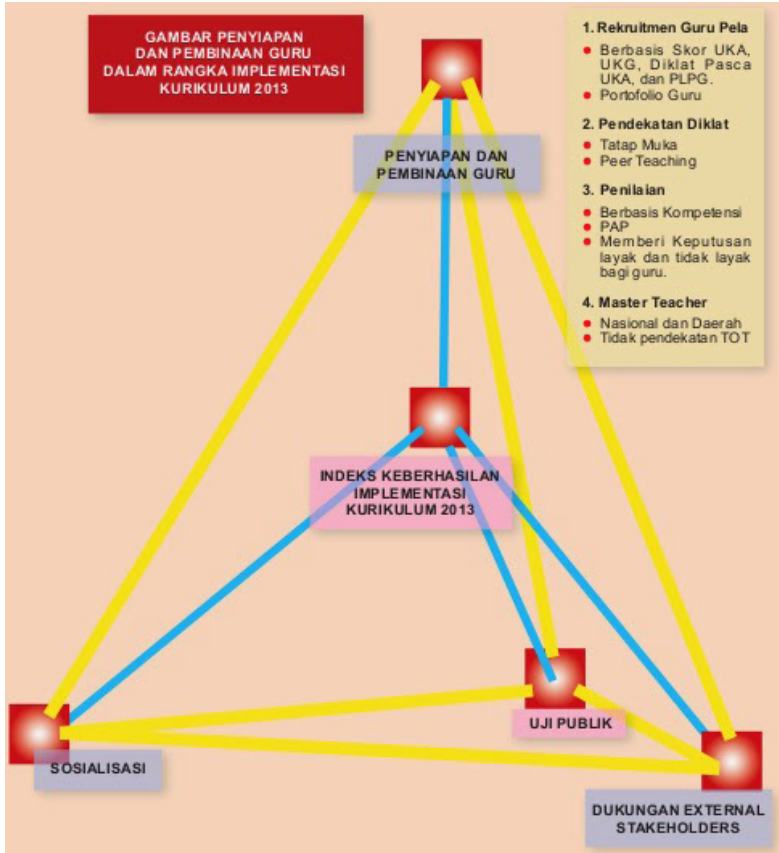


Sumber: kemdiknas.go.id

Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Guru harus dapat merubah mind setnya dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan produktif.

Kesiapan guru lebih penting daripada pengembangan kurikulum 2013. Kenapa guru menjadi penting? Karena dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Bagaimana penyiapan tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar : Penyiapan –Pembinaan Guru dalam Implementasi K 13



Sumber : <http://dadangjsn.blogspot.com/2014/03/faktor-penentuan-dan-faktor-pendukung.html> 9 sept 2014-09-09

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota :

1. Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum.

2. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional.
3. Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.
4. Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

Tabel : Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013
Strategi Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru Kelas/Mapel,
Kepala Sekolah, dan Pegawai :



Kegiatan Pelatihan bagi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berlangsung dari tahun 2013 s.d. tahun 2015 dilaksanakan pemerintah dalam mempersiapkan PTK sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum 2013.

Tabel : Implementasi Kurikulum 2013 pada seluruh jenjang pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun Pelajaran	Kelas
1	SD	2013/2014	I, IV
		2014/2015	I, II, IV, V
		2015/2016	I, II, III, IV, V, VI
2	SMP	2013/2014	VII
		2014/2015	VII, VIII
		2015/2016	VII, VIII, IX
3	SMA / SMK	2013/2014	X
		2014/2015	X, XI
		2015/2016	X, XI, XII

Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan secara bertahap telah dilakukan pada beberapa sekolah sasaran sejak bulan Juli tahun pelajaran 2013/2014, hingga pada tahun pelajaran 2015/2016 dipastikan implementasi kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP 2006 berlaku untuk semua kelas pada seluruh jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA / SMK dan berlaku dari bulan Juli pada setiap tahun pelajarannya.

Tabel : Pelaksanaan Kurikulum 2013



Sumber: [http://dadangjsn.blogspot.com/2014/06/penerapan-
implementasi-kurikulum-2013.html](http://dadangjsn.blogspot.com/2014/06/penerapan-implementasi-kurikulum-2013.html) 9 sept 2014-09-09

Sesuai dengan hasil wawancara dan analisis kuisioner yang diedarkana kepada responden bahwa tenaga pendidik sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013, dari 98 responden semua responden (100%) menyatakan siap mengimplementasikan kurikulum 2013.

BAB X

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR NEGERI PROVINSI GORONTALO

A. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung implementasi Kurikulum 2013 antara lain:

1. Tenaga pendidik (Guru)

Tenaga pendidik (guru) sebagai pelaksana pembelajaran yang secara langsung menerapkan Kurikulum. Oleh sebab itu setiap guru haruslah memahami karakteristik kurikulum yang diterapkan dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Untuk memiliki kompetensi tentunya perlu pelatihan-pelatihan secara terprogram yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan atau instansi yang terkait baik melalui dana APBN maupun APBD. Tenaga Pendidik atau Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran, merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Untuk

itu Guru harus mampu merancang perangkat pembelajaran yang baik mulai dari : mengkaji kurikulum, membuat pemetaan kompetensi, menganalisis silabus, menyusun RPP, menyusun bahan ajar, menyusun Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) , menetapkan media pembelajaran, menyusun instrumen penilaian sekaligus dengan pedoman dan rubrik penilaian, sehingga siswa mudah tanggap, mudah memahami pembelajaran yang diberikan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

2. Buku yang tersedia. Ketersediaan buku , apakah buku pedoman guru ataupun buku paket siswa ini adalah salah satu pendukung keberhasilan pembelajaran. Tenaga pendidik (guru) yang memiliki buku pegangan secara spontan akan mempermudah dalam penyajian materi pembelajaran. Demikian pula siswa yang memiliki buku paket yang sesuai dengan kurikulum pasti mereka terbantu dan mudah memahami pembelajaran.
3. Adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dari semua komponen yang terkait, utamanya kepala sekolah, para guru dan siswa yang ada di sekolah masing-masing, maka pasti akan terwujud motivasi yang kuat , kebersamaan akan terjalin maka tujuan pasti akan tercapai sehingga implementasi kurikulum baru terlaksana secara optimal.
4. Adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana sangat penting untuk setiap lembaga pendidikan. Jika sarana dan prasarana tersedia dan memadai maka semua kegiatan sekolah akan lancar dan pasti kegiatan pembelajaranpun akan menjadi lancar.

B. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat implementasi Kurikulum 2013 antara lain:

1. Guru yang kurang kreatif. Guru memang adalah ujung tombak dari pelaksana pembelajaran. Sebaik apapun kurikulum, sesempurna apapun kurikulum kalau gurunya kurang antusias, kurang proaktif, kurang kreatif, tidak inovatif, jalan di tempat tidak mau merubah pola pikirnya, kurang menyesuaikan diri dengan sikon , kurang menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman ,maka pasti implementasi kurikulum akan gagal. Namun sebaliknya jika guru selalu antusias, proaktif, kreatif, inovatif dalam mengimplementasikan kurikulum ,maka pasti pembelajaran akan tercapai sesuai dengan harapan.
2. Buku yang tidak tersedia. Ketidak sediaan buku di tempat apakah buku pegangan guru ataupun buku paket siswa , hal ini menjadi salah satu penghambat pembelajaran, karena guru tidak dapat menyajikan pembelajaran dengan benar dan optimal. Guru bingung materi apa yang akan diberikan , ada buku saja kadang-kadang dalam penyusunan perangkat pembelajaran tumpang tindih, tidak konsisten antara Kompetensi Dasar dengan Indikator, indikator dengan instrumen penilaian , apalagi tidak adanya buku bahkan akan lebih parah.
3. Kemampuan dan karakteristis siswa yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini tenaga pendidik (guru) mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena secara fisik dan mental siswa haruslah siap menerima pembelajaran, namun jika kemampuannya kurang , maka

berarti waktu pembelajarannya pun harus ditambah agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

4. Kurangnya dukungan dari orang tua. Orang tua umumnya kurang mendukung adanya kurikulum baru, kalau diperhadapkan dengan beban pembelian buku baru yang sesuai dengan kurikulum baru, karena dengan adanya sinyal dari Pemerintah Provinsi bahwa sekolah gratis. Jadi dalam pikiran para orang tua tidak ada lagi yang didanai di sekolah, kalau tiba-tiba ada pembelian buku baru, jelas orang tua kurang setuju, dan tidak mau mengeluarkan uang, karena dalih sekolah gratis.
5. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, apakah perangkat keras ataupun perangkat lunak. Perangkat keras, seperti: gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan perangkat lunak seperti: kurikulum, buku, pendekatan dan metode pembelajaran, dan lain sebagainya.

BAB XI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemahaman tenaga pendidik (guru) di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo tentang Kurikulum 2013 rata-rata sudah paham tentang karakteristik kurikulum 2013.
2. Tenaga pendidik (guru) sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013, dengan melihat kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) ataupun kerjasama dengan instansi yang terkait: Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Dikbudpora), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, baik kegiatan ini melalui dana APBN ataupun APBD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi maupun Diklat Kurikulum 2013, bahkan ditindaklanjuti dengan kegiatan KKG di masing-masing gugus dengan tujuan dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik (guru) dalam hal memperbaiki mutu/kualitas pembelajaran.
3. Faktor pendukung suksesnya Kurikulum 2013 adalah guru yang berkompetensi, buku yang tersedia, kerjasama dengan komponen sekolah, serta sarana dan prasarana yang

memadai. Sedangkan faktor penghambat sama dengan faktor pendukung hanya saja kebalikannya yakni guru yang kurang kreatif, buku tidak tersedia, kurangnya kerjasama yang baik dari semua komponen sekolah Kepala Sekolah dengan guru sebagai pelaksana pembelajaran dengan stakholder, orang tua yang acuh tak acuh, kemampuan dan karakteristik siswa yang berbeda-beda, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan tersebut di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, diharapkan komitmen dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang tentunya memerlukan dukungan semua pihak. Namun konsistensi pun harus dipertahankan dan ditingkatkan. Jangan sampai terjadi perubahan pemegang kekuasaan akan berubah, terjadi pergantian pemimpin maka akan berubah pula kurikulum yang diterapkan.
2. Untuk Penyelenggara pendidikan, dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 hendaknya penyelenggara pendidikan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara orang tua, masyarakat dan pemerintah, karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama agar pendidikan dapat berkualitas dan bermakna.
3. Untuk Pendidik atau guru. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar disamping tugas lainnya, yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran, sehingga guru akan tampil menjadi sosok yang memiliki kompetensi, mampu merancang pembelajaran yang berkualitas dengan pendekatan saintifik serta penilaian

otentik. Untuk mengharapkan implementasi kurikulum 2013 dapat terlaksana secara maksimal, maka diperlukan peran guru mengubah mindsetnya, harus menjadi motivator, dinamisator, fasilitator dalam membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif yang berbasis kinerja dan berbasis karakter.

4. Untuk perguruan tinggi diharapkan tetap mengikuti perkembangan Imtak dan Iptek dengan berbagai inovasi pendidikan terutama dalam pengembangan kurikulum yang berbasis kinerja dan karakter dalam mencapai kualitas pendidikan yang proporsional antara sikap, pengetahuan dan keterampilan.
5. Untuk peneliti lain. Diharapkan penelitian ini dapat berlanjut dengan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 pada semua jenjang pendidikan agar dapat diketahui mutu pembelajarannya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Diklat Kurikulum 2013 perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada tenaga pendidik, orang tua dan stake holders secara merata di Kabupaten /Kota, bahkan ditingkatkan terus agar dapat dipahami dengan baik Kurikulum 2013.
2. Perlu dukungan stakeholder terutama Pemda Kabupaten / Kota dalam memfasilitasi kelancaran sosialisasi dan diklat dalam hal penyiapan dana melalui APBD jangan hanya mengandalkan APBN demi meningkatkan kesiapan tenaga pendidik dalam menyelesaikan implementasi Kurikulum 2013 secara maksimal.

3. Bagi Pemerintah/ instansi yang terkait mulai dari LPMP, Dinas Provinsi , Dinas Kabupaten/Kota , dan Pemda Kabupaten / Kota tetap terus berkolaborasi, berkoordinasi , memfasilitasi dalam mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi, Diklat maupun pendampingan secara merata demi peningkatan kesiapan tenaga pendidik mengimplementasikan K13

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aspin, David N dan Chapman Judith D. 2007. “*Values Education and Lifelong Learning*”: *Principles, Policies, Programmes*. Netherlands: Springer.
- Bernardin, John H. dan Joyce E. A. Russell. 1998. “*Human Resources Management*”: *An Experiential Approach*. New York: Irwin/ McGraw-Hill.
- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Catharina, Hartini. 2005. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Guru Terhadap Kurikulum Berbasis Kompetensi*”: *Studi Kasus Pada Guru-Guru SMK Putra Tama Bantul Yogyakarta*, download 23 April 2014, search engine: google.com.
- Chamisijatin, Lise dkk. 2008. “*Bahan Ajar Cetak*”: *Pengembangan Kurikulum SD*. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Creswell, John W. Dan Vicki L. Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage Publication, Inc.
- Danim, Sudarwan dan H. Khairil. 2010. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1961. *Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

- Djam'an , Satori & Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Djumiran dkk. 2009. “*Bahan Ajar Cetak*”: *Profesi Keguruan*. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Downs, Anthony. 1967. *Inside Bureaucracy*, (Eigth Printing). Boston: Little, Brown and Company.
- Dadangjsn. 2014. *Faktor Penentu dan Pendukung Implementasi Kurikulum*. <http://dadangjsn.blogspot.com/faktor-penentu-dan-faktor-pendukung-html/> 09 sept 2014.
- Fathurrohman, Pupuh dan Aa Suryana. 2012. *Guru Profesional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ferguson, Adam. 1768. *An Essyay on History of Civil Society*. London: Printed for Millar, Cadel, Kincaid, and Bell.
- Hamid, Hamdani. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : . Remaja Posdakarya.
- Muzamiroh, Mida Latifatul. 2013. “*Kurikulum 2013*”:*Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013*. Diterbitkan oleh Kata Pena.
- Rakhman, Fathur. 2013. *Harapan Kurikulum*. <http://kemendikbud.go.id/kemendikbud/artikel-harapan-kurikulum> (09 sept 2014)
- Sagala, Syaiful. 2011. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Saondi, Ondi dan Aris Suherman. 2012. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Saudagar, Fachruddin dan Ali Idrus. 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: GP Press.

- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi (Ed). 1986. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Kerja Sama Rineka Cipta dan Pusat Perbukuan Depdiknas.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. “*Pengembangan Kurikulum*”: *Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprihatiningrum, Jamil. 2013. “*Guru Profesional*”: *Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syaifuddin, Mohammad dkk. 2007. “*Bahan Ajar Cetak*”: *Manajemen Berbasis Sekolah*. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Pengembang MKDP. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Yamin, Moh. 2012. “*Kurikulum Pedidikan*”: *Panduan Lengkap Tata Kelola Kurikulum Efektif*. Jogjakarta: Diva Press.
- Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Pakar Raya.

REGULASI

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

CURRICULUM VITAE



Rusmin Husain, lahir di Gorontalo pada 14 April 1960, anak dari pasangan Ali Husain Doji (Alm) dan Djaurah Bakari (Almh), anak keempat dari sepuluh bersaudara. Dalam perjalanan hidup menikah dengan Abd.Karim D. Umar pada Desember 1988; dikarunia dua orang anak, pertama Arif Alauddin Umar, S.IP, sementara menempuh Program Magister (S2) Jurusan Administrasi Pembangunan Konsentrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; dan kedua Dewi Nur Mawaddah Umar, duduk di Kelas XII IPA 3 MAN Insan Cendekia Gorontalo, serta seorang cucu Mohammad Nur Muhaimin.

Pendidikan yang pernah ditempuh adalah: SDN I Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, tamat tahun 1972. Dilanjutkan dengan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN 4 Th), tamat tahun 1975; PGAN 6 Th, tamat tahun 1979. Selanjutnya tamat Sarjana Pendidikan (S1) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FKIP Unsrat Gorontalo tahun 1985. Kembali mengikuti Pendidikan S1-Kedua di bidang Bahasa Indonesia Sekolah Dasar di IKIP Negeri Malang Tahun 1995; dan pada tahun 2004 memperoleh gelar Magister (S2) Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada Tahun 2012 menyelesaikan Program Doktor (S3) pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Pelatihan yang pernah diikuti: peserta pada Program Pelatihan Guru Pamong Angkatan III tahun 1997 tingkat nasional yang merupakan proyek PGSD Dirjen Dikti Depdikbud; peserta pada Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) tingkat lokal tahun 1999 yang diselenggarakan Depdikbud; peserta pada Pelatihan Program Pendekatan Terapan/*Applied Approach* (AA) tingkat lokal tahun 2000 yang diselenggarakan Depdiknas; peserta pada Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan di Era Otonomi Daerah tingkat lokal tahun 2001 yang diselenggarakan IKIP Negeri Gorontalo; peserta pada Pelatihan Inovasi Pembelajaran di SD tingkat internasional tahun 2009 yang diselenggarakan Jurusan PGSD dan FIP UNG; pemateri pada Pelatihan Seqip, Meqip, dan Inovasi Pembelajaran di SD tingkat lokal tahun 2009 kerja sama FIP UNG dengan Dikpora Kab. Gorontalo Utara; peserta TOT Praktik Baik Bagi Perguruan Tinggi Program MGP-BE tingkat nasional tahun 2009 kerja sama Pemerintah RI dengan UNICEF; peserta Pelatihan Klinik Pembelajaran Program PJJ S1 PGSD Program Bermutu tingkat nasional tahun 2011 yang diselenggarakan Dirjen Dikti Kemdiknas; serta peserta *Designing Quality Learning Facade/Landscape In Indonesia* tingkat nasional tahun 2012 yang diselenggarakan Dirjen Dikti Kemdikbud.

Pengalaman bekerja mulai tahun 1985-1986 sebagai Tenaga Pengajar di SMP Negeri 8 Gorontalo; Guru pada Sekolah Pendidikan Guru (SPG Negeri I Gorontalo) Tahun 1987-1990; Tutor di Universitas Terbuka; Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo (PGSD FIP UNG) sejak tahun 1991 sampai sekarang (Saat ini juga termasuk pengajar program pasca FIP UNG). Pengalaman lainnya, sebagai Ketua Program Studi D II PGSD

(2006-2008); Sekretaris Jurusan PGSD (2008-2010); Ketua Pengelola Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) S1 PGSD UNG yang berbasis ICT tahun 2010; dan Ketua Pengelola Program PJJ Mandiri S1 PGSD tahun 2012 sampai sekarang.

Dalam perjalanannya pernah menghasilkan sejumlah karya ilmiah: Kinerja Penilik Pendidikan Non Formal dalam Pelaksanaan Tupoksinya di Kabupaten Gornntalo, *Jurnal Pedagogika* 2011, Vol.1, No.3; Peranan Pendidikan Non Formal dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Pedagogika* 2011, Vol.2, No.1; *The Value Character Investment In Family Environments*, Proceeding 1 Mei 2011; Improving The Profesionalism of The Educator and The Educational, Proceeding 11 Oktober 2011; Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif dalam Meningkatkan Hasil Belajar Warga Belajar, *Workshop on Quality of Education Malaysia* 7 Maret 2012; serta *The Development of a Collaborative Learning Model for the Improvement of the Learner's Learning Outcomes: A Study in Selected State Owned Community Learning Centres in Gorontalo District in Indonesia*, 3 Issue, 4 December 2012, *Indian Journal of Health & Wellbeing*. Mengikuti Lokakarya Nasional Pengembangan Kurikulum PGSD Berbasis KKNI Menyongsong Pelaksanaan Kuriulum 2013, tertanggal 23 – 24 Juni di Malang yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen PGSD Indonesia Bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan. Mengikuti Pembekalan Nasional Pembekalan Kurikulum 2013 Bagi Asesor Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tertanggal 19 – 21 Juli 2013 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Dirjen Dikti. Selain itu juga sejumlah buku, yakni *Public Relations for School* yang diterbitkan MQS Publishing Bandung; *Profesi Guru* yang diterbitkan Ideal Publishing Gorontalo; *Manajemen*

Pendidikan; Orientasi Mutu, Teori dan Implementasi pada Aras Lokal yang juga diterbitkan Ideal Publishing Gorontalo; serta *Collaborative Learning* yang diterbitkan Rizqi Press Bandung.